

LAPORAN HASIL PENELITIAN

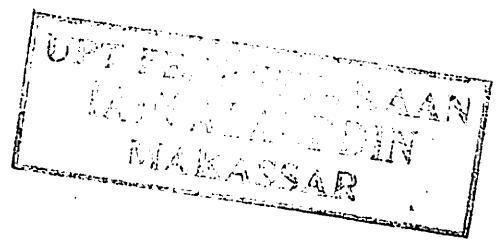
**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
PERUNDANG - UNDANGAN PERKAWINAN  
DI INDONESIA**  
*(Tinjauan Normatif dan Realitas Sosial)*



Oleh:

Drs. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag.  
NIP. 150 259 442

Dibiayai Oleh:  
**DIKS IAIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2002**  
**PUSAT PENELITIAN IAIN**  
**ALAUDDIN MAKASSAR**



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
PERUNDANG - UNDANGAN PERKAWINAN  
DI INDONESIA**  
*(Tinjauan Normatif dan Realitas Sosial)*



Oleh:

**Drs. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag.**  
**NIP. 150 259 442**

UPT. PENELITIAN IAIN ALAUDDIN MAKASSAR	
Tgl. Pengantar	
No. Pengantar	
Tempat	
Klasifikasi	
Disetujui Oleh	

**Dibiayai Oleh:**  
**DIKS IAIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2002**  
**PUSAT PENELITIAN IAIN**  
**ALAUDDIN MAKASSAR**



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ALAUDDIN MAKASSAR  
PUSAT PENELITIAN

Jl. Sultan Alauddin 63 Tlp. 864931, 864928 Pesawat 209

## KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah, syukur dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah swt., oleh karena dengan Hidayat dan TaufikNya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

IAIN Alauddin melalui Pusat Penelitian selalu berupaya agar para dosen senantiasa menaruh minat dalam melaksanakan penelitian. Sebab, penelitian sebagai dharma ke-2 dari Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu terus digalakkan untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian, ilmu pengetahuan akan mengalami stagnasi sehingga tidak mampu menjawab tantangan kemajuan saman dan kebutuhan pembangunan bangsa.

Kami mengharapkan agar penelitian ini dapat menambah khazanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara peneliti atas jerih payahnya melaksanakan penelitian. Semoga Allah swt, memberikan pahala yang setimpal

Makassar, 1 Desember 2002



Wassalam,  
Kepala,  
Dr. Moh. Natsir Mahmud, M.A.  
NIP. 150 217 170



**LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN  
LAPORAN HASIL AKHIR PENELITIAN  
TAHUN 2002**

---

1. a. Judul Penelitian : **POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
PERKAWINAN DI INDONESIA  
(*Tinjauan Normatif dan Realitas  
Sosial*)**
- b. Macam Penelitian : ( ) Murni ( ) Terapan ( ) Pengembangan
2. **Ketua Peneliti/Peneliti**
- a. Nama lengkap dan Gelar : Drs. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag  
b. Jenis Kelamin : Laki-Laki  
c. Pangkat/Gol. Dan NIP : Penata (III/d) / 150 259 442  
d. Jabatan Sekarang : Ketua Jurusan PA/AS  
e. Fakultas/Jurusan : Syari'ah /Peradilan Agama  
f. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum (Perkawinan)
4. Lokasi Penelitian : Kepustakaan
5. Jangka waktu penelitian : 6 bulan (1 Mei s/d 2 Desember 2002)
7. Biaya : 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu  
rupiah)

Makassar, 1 Desember 2002

MENGETAHUI  
KEPALA PUSAT

PENELITIAN IAIN ALAUDDIN, PENELITI,



Dr. Moh. Nasir Mahmud, MA  
NIP. 150 217 170

Drs. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag  
NIP. 150 259 442



**DEPARTEMEN AGAMA R.I.**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**PUSAT PENELITIAN**

Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864928-864931 (Fax. 864623)

---

**SURAT KETERANGAN**

No. PL./TL.01/72/2002

N a m a	: Drs. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag
N I P	: 150 259 442
Pangkat Golongan	: Penata (III/d)
Unit Kerja	: Fakultas Syariah
Judul Penelitian	: POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA ( <i>Tinjauan Normatif dan Realitas Sosial</i> )

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian tahun 2002 dan telah diseminarkan pada seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian IAIN Alauddin Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Makassar, 1 Desember 2002

Wassalam



Dr. Moh. Nasir Mahmud, MA  
NIP. 150 217 170

## ABSTRAK

Penelitian s ini berupaya mengungkap dan menganalisa pandangan Hukum Islam dan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia mengenai Poligami. Setelah mengungkap poligami dari sudut pandang Hukum Islam dan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, kemudian berusaha dianalisis mengapa poligami itu dibolehkan dalam Islam? Apa syarat dan alasannya?

Dalam pembahasannya, penelitian ini dilakukan melalui *kajian kepustakaan*, yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku kepustakaan dengan cara mengklasifikasikan yang berhubungan dengan pelaksanaan poligami baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan perkawinan di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan *yuridis*, *filosofis* dan *sosio-kultural*. Selanjutnya data yang sudah diklasifikasi kemudian diolah dengan menggunakan metode *deduktif*, *induktif*, dan *komparatif*, untuk kemudian menarik sebuah kesimpulan.

Penelitian berupaya mengkaji asal mula poligami. Dengan mengkaji sejarah poligami, maka akan diketahui sebab-sebab yang menjadi latar belakang adanya praktek poligami, baik pada masa sebelum Islam maupun setelah kedatangan Islam, sehingga dapat diketahui tujuan dari poligami itu sendiri. Hal ini kemudian berupaya diperhadapkan pada pandangan hukum Islam dan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, berupaya menganalisis alasan dan syarat dibolehkannya praktek poligami, kemudian melihat bagaimana prospek pelaksanaan poligami itu dalam hukum Islam dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, yang selanjutnya melihat praktek poligami itu dalam realitas sosial masyarakat.

Poligami bukanlah asas dari sebuah perkawinan. Poligami hanyalah merupakan alternatif terakhir dari sebuah kondisi yang mungkin terjadi. Poligami hanya dibolehkan dalam kondisi darurat, yaitu dengan memenuhi syarat dan alasan dibolehkannya poligami.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا  
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puja dan puji penulis persembahkan kehadirat Allah swt. karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga laporan hasil penelitian ini dapat dirampungkan. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi Besar Muhammad saw. yang menjadi uswatun hasanah serta menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penelitian ini mengungkap tentang poligami dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan perkawinan di Indonesia (*tinjauan normatif dan realitas sosial*). Dengan mengamati masalah poligami dari sudut pandang hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia dengan melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan dan memperoleh bantuan dana DIKS IAIN Alauddin tahun 2002, dalam kaitan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor IAIN Alauddin, Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA. dan Kepala Pusat Penelitian IAIN Alauddin, Dr. Moh. Natsir Mahmud, MA. yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini dengan bantuan biaya DIKS IAIN Alauddin.
2. Teman-teman peneliti, baik penelitian DIP maupun DIKS IAIN Alauddin yang telah memberikan koreksi dan input yang sangat berharga demi kesempurnaan laporan hasil penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat yang besar dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

*Billahit taufiq wal hidayah.*

Makassar, 1 Desember 2002  
Wassalam

Drs. Muhammad Saleh Ridwan, MA  
NIP. 150 259 442



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA SAMBUTAN .....	ii
LEMBAR IDENTITAS PENELITI .....	iii
SURAT KETERANGAN SELESAI DISEMINARKAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	6
C. Hipotesis .....	7
D. Pengertian Judul .....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
<b>BAB II : PENGERTIAN DAN SEJARAH POLIGAMI</b>	
A. Pengertian Poligami .....	18
B. Sejarah Poligami .....	21
<b>BAB III : HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TENTANG POLIGAMI</b>	
A. Poligami dalam Hukum Islam .....	36
B. Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia .....	62
<b>BAB IV : POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF DAN REALITAS SOSIAL</b>	
A. Prospektif Pelaksanaan Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia..	82
B. Poligami dalam Hukum Islam dan Realitas Sosial .....	87
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	95
B. Implikasi .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Alquran menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dan manusia (laki-laki) secara naluriah di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan juga sangat menyukai lawan jenisnya (perempuan), demikian pula sebaliknya.

Untuk memberikan jalan terbaik bagi terjadinya “perhubungan” manusia dengan lain jenisnya itu, Islam menetapkan jalan atau suatu ketentuan yaitu perkawinan. Perkawinan yang baik adalah yang menjamin dan memelihara hakekat dan tujuan perkawinan. Allah swt. telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan harmonis antara laki-laki dan perempuan di bawah naungan syariat Islam dan batasan-batasan hubungan antar mereka, sebagaimana disinyalir oleh Allah dalam QS. al-Rum (21): 21

Ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) dan mengingatkan akan kebesaran Allah serta diridai oleh Allah swt. Untuk itulah Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani dalam perkawinan, termasuk dalam berpoligami.

Seorang wanita merasa butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang banyak serta intelektualitas yang memadai. Begitu pula sebaliknya seorang laki-laki membutuhkan isteri yang mendampinginya sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah saw. bahwa sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang shalihah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perempuan butuh suami dan laki-laki lebih membutuhkan isteri. Suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa dari data statistik yang ada diberbagai negara jumlah wanita lebih banyak daripada pria,<sup>1</sup> apatah lagi di masa perang dan lebih banyak laki-laki yang meninggal daripada wanita.<sup>2</sup>

Perlu diketahui bahwa salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami, ada yang pro dan ada yang kontra, bahkan ada yang bersifat netral. Adapun dasar dari ayat Alquran dan perundang-undangan yang menjadi landasan antara lain QS. al-Nisa (4): 3.

Ayat di atas dijadikan legitimasi bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dan dari ayat ini pula sebagian orang menjadikan legitimasi dalam pelaksanaan poligami. Namun hal ini banyak mengundang

---

<sup>1</sup>Lihat H. Chuzaimah T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. II; Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1899), h. 109.

<sup>2</sup>Lihat Musfir al-Jahrani, *Nazarat fi Ta'addud al-Zaujat* diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dengan Judul *Poligami dari berbagai Persepsi* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 67.



perdebatan dikalangan ulama, ada yang pro dan ada yang kontra dan dari berbagai pemikir Islam hingga sekarang.<sup>3</sup>

Jika melihat dairah ayat tersebut di atas, maka tentu kita akan mengatakan bahwa seseorang boleh berpoligami, karena dengan jelas ayat ini menyebutkan *فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع* artinya “kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai dua, tiga atau empat”. Namun tentunya untuk mendapatkan pemahaman secara utuh dan sempurna, tentunya tidak boleh memahami ayat itu secara parsial, melainkan harus memahami keseluruhan ayat yang terkait dalam persoalan tersebut, harus dilihat dan dibahas satu persatu untuk mendapatkan benang merah yang mempertautkan kandungan dari berbagai ayat yang berbeda<sup>4</sup>. misalnya jika melihat QS. al-Nisa (4): 129 :

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان  
تصلحوا وتقوا فان الله كان غفورا رحيما .

Terjemahnya :

‘Dan kamu tidak akan sanggup untuk berlaku adil di antara wanita-wanita itu, walaupun kamu ingin sekali untuk melaksanakan keadilan itu, oleh sebab itu janganlah kamu condong kepada salah seorang diantaranya sehingga menyebabkan yang lain seperti tergantung, tidak dinikahi dan tidak dicerai. Dan kalau kamu berusaha untuk berbuat

---

<sup>3</sup>A. Qadir Audah, *Al-Islam Bayna Jahl Abnaihi wa'jazi Ulama*, diih bahasa oleh Mu'ammal Humaidiy dengan Judul *Islam di antara Kebodohan dan Kelemahan Ulama* (Jakarta: Media Dakwah, 1997), h. 9.

<sup>4</sup>Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 31 dan lihat juga Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung, Mizan, 1994), h. 111

baik dan bertaqwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang).<sup>5</sup>

Ayat ini secara umum memberi pemahaman bahwa jika adil menjadi syarat utama dalam berpoligami, maka seseorang tidak boleh berpoligami, karena tidak ada manusia yang mampu berlaku adil. Begitu pula dasar dari perundang-undangan perkawinan di Indonesia seperti :

#### 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam UU No.1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 3, 4 dan 5<sup>6</sup>. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

- Pasal 3 (1) : Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) : Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- Pasal 4 (1) : Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

---

<sup>5</sup>Lihat *ibid.*, h. 144

<sup>6</sup>Lihat H. Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: al-Hikmah, t.th.), h. 124.

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

-Pasal 5 (1) : Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup, isteri-isteri anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) : Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974.

Dalam PP No.9 Tahun 1975, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 40, 41, 42, 43 dan 44.<sup>7</sup>

Dari dua dasar hukum yang dikemukakan di atas baik dari Alquran maupun dari perundang-undangan perkawinan di Indonesia, memberikan gambaran secara umum tentang adanya kemungkinan

---

<sup>7</sup>Lihat *ibid.*, h. 161.



kebolehan berpoligami. Namun hukum perundang-undangan perkawinan jauh lebih mempersempit kemungkinan untuk berpoligami ketimbang hukum Islam, karena hukum Islam hanya mensyaratkan keadilan sedangkan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, di samping adanya alasan juga harus terpenuhi persyaratan-persyaratan seperti, keadilan, persetujuan isteri-isteri dan izin atasan langsung.

Namun satu hal yang perlu diperhatikan bahwa orang yang menyalahgunakan sistem poligami dapat diobati dengan mudah oleh pemerintah, tetapi keburukan-keburukan yang dilakukan orang yang menolak sistem poligami, bagi pemerintah akan sangat sulit mengobatinya<sup>8</sup>. Kenyataan sosial di masyarakat bahwa sekalipun kedua hukum tersebut sangat mempersulit poligami pada prakteknya sebagian masyarakat tetap melakukannya, apakah dengan cara terang-terangan, ataupun secara sembunyi-sembunyi.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan pokok pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan perundang-undangan perkawinan di Indonesia tentang poligami dilihat dari normatif dan prospektif serta realitas sosial pada masyarakat.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka untuk mempertajam dan mensistematisasikan pembahasan ini, maka penulis mengangkat permasalahan pokok yaitu “ Bagaimana hukum poligami

---

<sup>8</sup>Lihat H. Zainal Abidin Abubakar, *op. cit.*, h.110. Lihat pula Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980), h. 427.

dalam hukum Islam dan perundang-undangan perkawinan di Indonesia dilihat dari perspektif dan prospektif serta realitas sosial pada masyarakat”.

Untuk memperjelas permasalahan pokok di atas, maka diperinci lebih lanjut dalam beberapa sub masalah, yakni:

1. Bagaimana perkembangan poligami ditinjau dari segi sejarah?
2. Bagaimana konsep poligami menurut pandangan hukum Islam dan perundang-undangan perkawinan di Indonesia?
3. Bagaimana praktek poligami ditinjau dari segi normatif dan realitas sosial pada masyarakat ?

### ***C. Hipotesis***

Dalam mengadakan sebuah penelitian dituntut adanya hipotesis sebagai jawaban sementara dari apa yang akan dibahas. Oleh karena itu, hipotesis atau jawaban sementara dari beberapa permasalahan yang diajukan dapat dikemukakan bahwa :

1. Banyak orang yang salah menafsirkan makna poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, sebab berabad-abad sebelum Islam datang, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.

Sejarah poligami dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu praktek poligami pada masa sebelum dan setelah Islam datang.

Agama Islam bukanlah agama yang pertama kali membolehkan poligami. Sebelum Islam datang, praktek poligami sudah berlaku pada

berbagai bangsa. Anggapan bahwa Islamlah yang membawa aturan perkawinan dengan sistem poligami di samping monogami adalah kurang tepat. Data yang ada menunjukkan bahwa praktek poligami telah berlangsung di negeri-negeri yang tidak beragama Islam hingga sekarang, seperti penduduk asli Asia Afrika, Hindu, India, Cina dan Jepang.

Praktek poligami tidak hanya berlaku di kalangan bangsa yang beragama Islam saja, bahkan agama-agama besar sebelum Islam lahir seperti Hindu-Budha, agama Yahudi dan Nasrani telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi poligami. Agama Yahudi umpamanya, memperbolehkan poligami tanpa batas, tergantung kepada kemauan suami. Berita dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan bahwa Nabi Daud a.s. juga melakukan praktek poligami dengan mengumpulkan ratusan isteri, baik yang merdeka maupun yang berstatus budak.

Dengan demikian, tampak bahwa praktek poligami pada masa datangnya Islam sangat berbeda dengan praktek poligami yang ada sebelumnya. Perbedaan tersebut menonjol pada dua hal, yaitu pada bilangan isteri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak isteri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. Selanjutnya syarat mampu berlaku adil. Sebelumnya poligami tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.



2. Orang-orang Barat menilai bahwa poligami adalah sebuah cacat dan kejanggalan dalam hukum Islam. Padahal poligami yang ditetapkan oleh Islam bertujuan untuk menanggulangi dan memperbaiki keadaan manusia. Olehnya itu, setiap muslim harus menyadari bahwa poligami pada hakikatnya merupakan institusi yang patut dibanggakan dalam Islam. Inilah jalan keluar yang ditawarkan Islam untuk menyelesaikan persoalan pelik yang dihadapi oleh seluruh umat di dunia. Persoalan ini memang hanya bisa diselesaikan dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam.

Namun dalam kenyataan, tidak sedikit umat Islam yang malah kembali menyerang konsep mulia yang ditawarkan Islam ini. Bahkan dalam rangka menyejajarkan diri dengan orang-orang Kristen, banyak pakar hukum Islam yang mencabut ketentuan hukum poligami ini ataupun membatasinya dengan sejumlah persyaratan yang tidak ada dalam agama. Misalnya, harus ada izin dari isteri pertama, atau si suami harus membayar uang dengan jumlah yang sangat besar, atau harus mendapat izin dari hakim, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu bertujuan menghambat dan mencegah poligami.

Peraturan-peraturan mengenai poligami ini dapat dilihat pada UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974, PP No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, PP. No. 45/1990 tentang Perubahan atas PP No. 10/1983, SE. BAKN No. 48/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990 tentang Perubahan atas PP No. 10/1983, SEMA No. 5/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan No. 10/1983, Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Secara psikologis, semua isteri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Hal itu didorong oleh rasa cinta setianya yang dalam kepada suamiya. Umumnya isteri mempercayai dan mencintai suaminya sepenuh hati, sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang terhadap laki-laki lain. Isteri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, isteri tidak dapat menerima suaminya membagi cinta dengan perempuan lain, bahkan kalau mungkin, setelah mati pun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi. Terkadang isteri merasa diri inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama semakin meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga.

Realitas dalam masyarakat dapat dilihat bahwa perkawinan poligami banyak menimbulkan problem dalam masyarakat. Di antaranya: pertengkaran di antara anak-anak dan ibu tirinya, antara suami dengan para isterinya, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, tidaklah dapat disimpulkan bahwa semua perkawinan poligamis banyak mengundang keresahan dalam masyarakat, sebab di samping dampak negatif yang ditimbulkan juga terdapat dampak positif. Seperti, dapat menyelamatkan wanita yang jumlahnya lebih banyak untuk tidak terjun dalam lembah maksiat dengan menjadikannya sebagai isteri, suami yang dapat berlaku adil dan bijaksana dapat menghidupi para isteri dan anak-anaknya, sehingga kedamaian dalam rumah tangga dapat tercipta, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, baik buruknya dampak dari poligami itu sangat tergantung pada laki-laki yang ingin berpoligami.

#### **D. Pengertian Judul**

Untuk mendapatkan pemahaman secara utuh dan sempurna terhadap judul penilaian ini, maka peneliti merasa perlu menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan<sup>9</sup> atau sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa orang wanita sebagai isteri dalam waktu yang bersamaan.

Hukum Islam adalah koleksi daya upaya *fuqahā* dalam menetapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau dapat juga dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi masyarakat.<sup>10</sup> Jadi, hukum Islam adalah hukum yang digali dari Alquran dan hadis Rasulullah oleh para *fuqahā* yang berlaku secara global.

Perundang-undangan perkawinan di Indonesia adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan, termasuk di dalamnya poligami yang merupakan bahagian dari fiqh, atau hasil ijtihad ulama-ulama yang diakui dan diangkat oleh negara menjadi sebuah aturan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

---

<sup>9</sup>Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 2.

<sup>10</sup>TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 10.

Perundang-undangan di Indonesia (Hukum Positif) adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Hukum yang sekarang berlaku di tanah air Indonesia adalah hukum positif Indonesia. Hukum positif dinamakan *ius constitutum*, merupakan hukum yang dicita-citakan atau diingatkan oleh masyarakat, baik waktu sekarang maupun untuk selanjutnya.<sup>11</sup> Perundang-undangan dimaksud adalah UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974, PP No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, PP No. 45/1990 tentang Perubahan atas PP No. 10/1983, SE. BAKN No. 48/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990 tentang Perubahan atas PP No. 10/1983, SEMA No. 5/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan No. 10/1983, PMA No. 2/1987 tentang Wali Hakim dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah suatu penelitian tentang bagaimana hukum poligami (perkawinan lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan), baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia, dengan melihat pada dua sisi tinjauan yakni normatif dan realitas sosialnya. Kemudian memahami dan mengetahui pandangan hukum Islam dan perundangan-undangan perkawinan di Indonesia tentang poligami, sehingga memberi pemahaman dan sikap yang benar terhadap poligami. Selanjutnya dari permasalahan di atas dapat ditelusuri dan diketahui tentang syarat-syarat dan alasan kebolehan dalam berpoligami baik dalam

---

<sup>11</sup>Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap* (Cet.I; Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 25.

hukum Islam maupun dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, sehingga tidak memberikan kesan bahwa pelaksanaan poligami dapat dilakukan dengan bebas tanpa batas-batas tertentu. Akhirnya dapat ditarik titik terang mengenai hikmah dan tujuan berpoligami dalam hukum Islam maupun dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, sehingga pelaksanaan poligami walaupun itu harus terjadi tidak mendatangkan keresahan dalam masyarakat, melainkan memberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam sebuah rumah tangga.

### ***E. Metode Penelitian***

#### **1. Metode Pendekatan**

Obyek penelitian dalam pembahasan ini adalah materi perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan hukum poligami baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan.

Pendekatan yuridis, yaitu suatu usaha pendekatan terhadap substansi masalah dengan menggunakan teori hukum yang berkaitan dengan poligami, khususnya dalam hukum Islam dan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Pendekatan filosofis dipergunakan dalam penelitian ini guna mengkaji mengenai inti, hakekat dan hikmah yang terkandung dibalik uraian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teleologis, karena dalam kajian ini menguraikan tentang peraktek dan pelaksanaan poligami, dengan menggunakan dalil-dalil yang mendukung setiap statemen yang dalam pembahasan ini, baik yang bersumber dari Alquran maupun hadis-hadis Rasulullah saw.

Pendekatan sosio-kultural pun menjadi hal penting dalam penelitian ini, karena penelitian ini sangat terkait langsung dengan kultur masyarakat dengan segala faktor yang melingkupinya, begitu pula dengan pendekatan historis yakni pendekatan dengan menggunakan peristiwa masa lampau (sejarah) sebagai bahan perbandingan dalam meneliti hal yang dimaksud.

## 2. Metode Pengumpulan dan analisis Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan, dengan cara mengklasifikasikan yang berhubungan dengan pelaksanaan poligami baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan.

Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya diolah dengan menggunakan tehnik atau metode pengolahan dan analisis data yang terdiri dari:

### a. Metode induktif

Yaitu mengkaji sejumlah data secara spesifik mengenai masalah yang menjadi nbyek penelitian dan menjabarkannya secara general.

### b. Metode deduktif

Yaitu sejumlah data yang sifatnya umum dikembangkan dengan dengan cara silogisme kemudian ditarik kesimpulan

### c. Metode komparatif

Yaitu membandingkan semua data dan pendapat yang ada, terutama menyangkut masalah poligami dalam perspektif dan prospektif, baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia, kemudian menarik suatu kesimpulan.



## ***F. Tinjauan Pustaka***

Pembahasan mengenai perkawinan telah banyak diungkap oleh para cendekiawan dan puqaha. Demikian pula mengenai masalah poligami, namun tidak dibahas secara terinci apalagi dalam kaitannya dengan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, sehingga peneliti merasa perlu untuk membahasnya. Dalam hal ini, beberapa literatur yang penulis temukan antara lain:

1. Dr. Musdah Mulia, MA., APU., Dalam bukunya memuat tentang kritik atas pelaksanaan poligami yang dilakukan sebagian masyarakat. Judul bukunya adalah *Pandangan Islam tentang Poligami*, dengan pokok bahasan menyingkap tabir poligami, poligami dalam perspektif Islam, berbagai Implikasi poligami dan kritik terhadap kebijakan pemerintah mengenai poligami. Pada buku ini, memiliki kecenderungan monogami daripada poligami.

2. DR. Musfir al-Jahrani, mengungkap tentang berbagai bentuk perkawinan dan syari'at poligami dalam Islam dengan judul bukunya *Poligami dari berbagai Persepsi*, yang dimulai dengan perkawinan pada zaman Jahiliyah dan Islam, Sejarah dan jenis poligami, Syari'at poligami dalam Islam, Diterimanya alasan berpoligami dalam Islam, kesalahan pahaman tentang aturan poligami serta hikmah poligami Rasulullah saw. Pada buku ini memiliki kecenderungan untuk melaksanakan poligami dengan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima.

3. DR. Mustafa al-Siba'iy dalam bukunya yang berjudul *al-Mar'ah bayna al-Fiqh wa al-Qanun* mengungkapkan pada bagian pertama

tentang hak-hak dan kedudukan wanita sepanjang sejarah. dan pada bagian kedua kebutuhan kepada perbaikan, termasuk masalah poligami yang pada pembahasannya diuraikan poligami sebagai kebutuhan masyarakat, eksese-eksese poligami dan undang-undang poligami dalam Alquran dan tidak terlupakan perbaikan dalam bidang politik dan sosial. Buku ini memiliki kecenderungan akan kebolehan berpoligami, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa berpoligami tentu akan menimbulkan eksese-eksese tertentu.

4. H. Zainal Abidin Abubakar, SH. dengan Judul bukunya *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, buku ini walaupun sifatnya kumpulan, tetapi cukup lengkap dan praktis bagi masyarakat dan pejabat yang ingin mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama dan pejabat-pejabat di lingkungan badan Peradilan Agama. Di dalamnya banyak banyak Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Undang-Undang, termasuk yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

5. Jamilah Jones dan Abu Aminah, dalam bukunya yang berjudul *Plural Marriage in Islam (Monogami dan Poligami dalam Islam)*, berisi petunjuk bagi siapa yang ingin memahami hak-hak dan kewajiban orang laki-laki dan perempuan dalam poligami. Pada buku ini lebih bersifat petunjuk praktis atau pedoman bagi orang yang memiliki isteri lebih dari seorang.

Dari berbagai literatur yang dikemukakan, cukup memberi penjelasan dan pemahaman sekitar poligami, akan tetapi belum ada yang

membahas secara jelas tentang perspektif dan prospektif poligami dalam dua pandangan hukum, yakni hukum Islam dan perundangan-undangan perkawinan di Indonesia dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat. Tentunya penelitian ini dimaksudkan mengurai secara jelas dan memberi perbandingan dari kedua hukum tersebut. Oleh karena itu penelitian ini tidak bermaksud mengurangi karya yang sudah ada, melainkan akan mengungkapkan hal-hal yang belum sempat diuraikan oleh karya-karya sebelumnya.

### ***G. Tujuan dan Kegunaan***

#### **1. Tujuan**

Untuk mengetahui secara baik tentang pengertian dan sejarah poligami, sehingga tidak memberi pemahaman dan penilaian terhadap poligami secara negatif. Kemudian mengkaji pandangan, syarat dan alasan poligami, baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan perkawinan di Indonesia, sehingga pelaksanaan poligami tidak secara bebas tanpa alasan syarat tertentu.

#### **2. Kegunaan**

Memberi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi literatur bagi khasanah intelektual pada umumnya, terutama dalam masalah poligami. Selanjutnya dari hasil penelitan ini diharapkan memberi pemahaman yang jelas bagi masyarakat baik dari sudut pandang hukum Islam maupun dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

## BAB II

### PENGERTIAN DAN SEJARAH POLIGAMI

#### ***A. Pengertian Poligami***

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata “*poly*” atau “*polus*” yang artinya banyak, dan kata “*gamein*” atau “*gamos*” yang artinya kawin atau perkawinan, yang jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tak terbatas,<sup>1</sup> atau seorang laki-laki mempunyai pasangan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan atau seorang isteri mempunyai banyak suami dalam waktu yang sama.<sup>2</sup>

Dalam literatur lain disebutkan bahwa poligami berasal dari bahasa Inggris “*poligamy*” dan dalam hukum Islam disebut تعدد الزوجات yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita.<sup>3</sup> Begitu juga halnya dengan istilah polyandri berasal bahasa Inggris “*polyandry*” dan dalam hukum Islam disebut تعدد البعول atau تعدد الأزواج yang berarti bersuami lebih dari seorang pria.

Dalam pengertian umum yang berlaku dalam masyarakat, poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi sosial poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-

---

<sup>1</sup>Lihat Labib MZ, *Pembelaan Umat Muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), h. 15.

<sup>2</sup>Lihat Hassan Sadily, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid V (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1994), h. 2736.

<sup>3</sup>Lihat Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Cet. I: Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 49. Lihat pula Mustafa al-Siba'iy, *al-Mar'ah Bayna al-Fiqh wa al-Qanun* (t.tp.: al-Maktabah al-Arabiyyah al-Bābi al-Halabiy, t.th.), h. 71.

laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :<sup>4</sup>

1. *Polyandri* yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki.
2. *Poligini* yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.

Namun dalam perkembangannya, istilah poligini jarang sekali digunakan, bahkan dapat dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropolog saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan banyak perempuan sebagai lawan dari kata polyandri.

Istilah lain poligami di Indonesia dengan nama *permaduan*, *bermadu*. Di Jawa, istilah poligami dikenal dengan nama *wayuh*. Suami dikatakan *bermadu*, sedangkan isteri disebut *dimadu*. Antara masing-masing isteri yang *dimadu* disebut *madu* atau *maru*. Kata *maru* tidak hanya dipergunakan untuk predikat antar masing-masing isteri yang *dimadu*, tetapi juga dipergunakan antara isteri dengan bekas isteri dari seorang laki-laki.<sup>5</sup>

Dalam prakteknya memang jarang sekali bahkan dapat dikatakan tidak ada seorang laki-laki secara langsung mempunyai isteri dua atau tiga, jarang sekali laki-laki itu menikah sekaligus dua atau tiga wanita, mungkin hanya Sunan Giri yang pernah melaksanakan poligami dalam satu hari

---

<sup>4</sup>Lihat Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami* (Cet. I; Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), h. 71.

<sup>5</sup>*Ibid* h. 72.

karena memang kedua calon isteri dan mertuanya menghendaki demikian. Setelah shalat dhuhur, Sunan Giri dinikahkan Sunan Ampel dengan putrinya Dewi Murtasiyah dan setelah sholat ashar dinikahkan oleh Sunan Bungkul dengan Dewi Wardah.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa poligami adalah perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita,<sup>7</sup> walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan sampai 18 orang atau 9 orang.<sup>8</sup> Terjadinya perbedaan pendapat tentang batasan jumlah maksimal, karena perbedaan penafsiran QS. al-Nisa (4): 3, walaupun yang lebih umum dan disepakati oleh kebanyakan ulama adalah batasan sampai empat saja.

---

<sup>6</sup>Sebuah kisah menceritakan proses pernikahan antara putri Kyai Ageng Bungkul dengan Sunan Giri. Konon Kyai Ageng Bungkul memiliki buah delima di pekarangannya di pinggir Kali Mas, dan ia pernah bersumpah siapa saja orangnya yang nanti memakan buah delima (yang hanya berbuah satu itu) dan tampaknya aneh, akan dikawinkan dengan putrinya. Sumpah ini tidak diketahui oleh orang lain termasuk Sunan Giri dan putrinya. Setelah buah delima itu jatuh ke sungai dan hanyut, dia menelusuri sungai Mas dan mencari jejak ke mana delima itu terbawa arus, lalu Sunan Giri memakannya dengan tidak sengaja. Setelah sadar bahwa buah itu bukan miliknya, ia pun menelusuri sungai sampai ke hulu untuk mencari asal muasal buah delima tersebut, dan ketemu dengan Kyai Ageng Bungkul yang sudah mengucapkan sumpahnya itu. Sunan Giri lalu menghadap ke Sunan Ampel, dan hasilnya Sunan Giri disetujui/diizinkan untuk berpoligami. Untuk Selengkapnya baca *ibid.*, h. 73.

<sup>7</sup>Lihat Ny. Soemiyati, SH, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 74

<sup>8</sup>Lihat A. Rahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law* diterjemahkan oleh Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman dengan judul *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 264.



## **B. Sejarah Poligami**

Sebagian orang menganggap Islam membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, sebab berabad-abad sebelum Islam datang, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal poligami.<sup>9</sup>

Untuk mengetahui secara mendetail asal usul poligami, maka akan dikemukakan dalam dua tahapan, yaitu :

### **1. Praktek poligami pada masa sebelum islam**

Agama Islam bukanlah agama yang pertama kali membolehkan poligami. Sebelum Islam datang, praktek poligami sudah berlaku pada berbagai bangsa. Di antara bangsa-bangsa yang menjalankan praktek poligami yaitu: ibrani, Arab Jahiliyah dan Cisilia. Bangsa-bangsa tersebut selanjutnya melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslowakia, Yugoslavia dan sebagian orang-orang Jerman dan Saxon yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.<sup>10</sup>

Anggapan yang selama ini mengkristal bahwa Islamlah yang membawa aturan perkawinan dengan sistem poligami di samping monogami adalah kurang tepat. Data yang ada menunjukkan bahwa

---

<sup>9</sup>Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), h. 3.

<sup>10</sup>Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, alihbahasa Muhammad Thalib, Jilid IV (Cet. XV; Bandung: PT. al-Ma'arif, t. th.), h. 190.

praktek poligami telah berlangsung di negeri-negeri yang tidak beragama Islam hingga sekarang, seperti penduduk asli Asia Afrika, Hindu, india, Cina dan Jepang.<sup>11</sup>

Dengan demikian, praktek poligami tidak hanya berlaku di kalangan bangsa yang beragama islam saja, bahkan agama-agama besar sebelum Islam lahir seperti Hindu-Budha, agama Yahudi dan Nasrani telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi poligami. Agama Yahudi umpamanya, memperbolehkan poligami tanpa batas, tergantung kepada kemauan suami. Berita dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan bahwa Nabi Daud a.s. juga melakukan praktek poligami dengan mengumpulkan ratusan isteri, baik yang merdeka maupun yang berstatus budak.<sup>12</sup>

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dahulu tidak semata-mata didasari rasa cinta dan keinginan untuk membina rumah tangga bahagia dan sejahtera, tetapi lebih kepada pertimbangan status sosial.<sup>13</sup> Pernyataan tersebut memberikan indikasi bahwa isteri merupakan simbol status sosial seorang laki-laki. Banyaknya isteri yang dimiliki seseorang menunjukkan semakin tinggi pula status sosialnya dalam masyarakat.

Tidak adanya undang-undang yang jelas melarang poligami dalam masyarakat bangsa Israel Kuno menyebabkan berlangsungnya praktek poligami tanpa batas dan tanpa syarat. Tugas suami hanya sebatas

<sup>11</sup>Lihat *ibid*.

<sup>12</sup>Lihat Abbas Mahmud al-Akkad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*, dialihbahasa oleh Chadidjah Nasution dengan judul *Wanita dalam Al-Qur'an* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 132.

<sup>13</sup>Lihat Ali Syari'ati, *Women in the Eyes and Heart of Muhammad*, diterjemahkan oleh Sofyan Abu Bakar dengan judul *Wanita di Mata dan Hati Rasul Allah* (Jakarta: Risalah Masa, 1992), h. 61.

menyediakan tempat tidur dan belanja. Praktik seperti ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi juga oleh nabi dan para penguasa, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang keduanya memiliki isteri yang banyak. Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan yang terdapat dalam pasal 11 dari kitab raja-raja bahwa Sulaiman memiliki 700 isteri dan 300 orang budak.<sup>14</sup> Bahkan disinyalir bahwa di Cina pada saat itu, seorang laki-laki yang memiliki 3000 orang isteri bukanlah merupakan hal yang aneh.<sup>15</sup>

Setelah bangsa Israil Kuno berlalu, datanglah agama Kristen yang merupakan agama terbesar dan memiliki kitab suci. Namun agama Kristen tidak memperluas undang-undang kemasyarakatan yang ada, karena agama tersebut lahir di tengah masyarakat yang dikuasai oleh dua bangsa (Yunani dan Romawi) yang sama-sama bersikap kaku dalam menggariskan perundang-undangan dan sangat terikat secara tekstual kepada undang-undang yang ditetapkannya. Agama Kristen sebagai agama baru pada saat itu hanya mengetengahkan masalah perkawinan dari segi ibadat atau dari aspek yang berhubungan dengan alam lain selain alam dunia ini.

Tidak ada dalam kata-kata Nabi Isa a.s. suatu keterangan yang jelas mengenai landasan perkawinan monogami atau landasan melarang

---

<sup>14</sup>Lihat Mustafa al-Siba'iy, *al-Zawaj al-Islami al-Mubakkir: Sa'adah wa Hasanah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nurdin dengan judul *Kawinlah Selagi Muda: Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri* (Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2000), h. 100.

<sup>15</sup>Lihat Abbas Mahmud al-Akkad, *op. cit.*, h. 131.

poligami.<sup>16</sup> Tidak ada redaksi yang jelas dalam kitab suci agama Kristen yang melarang poligami, dan yang ada hanyalah kata-kata Paulus (rasulnya yang besar) yang mengatakan bahwa sebaiknya seorang suami mencukupkan satu isteri saja, khususnya bagi mereka yang bertugas di bidang agama dan memutuskan diri dari kepentingan duniawi.

Agama Kristen tampaknya menolak praktek poligami, tetapi sesungguhnya larangan tersebut bukan bersumber dari ajaran asli agamanya tetapi lebih merupakan kelanjutan dari tradisi Romawi yang pernah menyelamatkan agama ini.<sup>17</sup> Jika para pemeluk agama Kristen bangsa Eropa pertama telah mempraktekkan sistem perkawinan dengan membatasi satu perempuan saja, maka praktek tersebut adalah karena sebagian besar bangsa Eropa penyembah berhala yang didatangi oleh agama Kristen pertama kalinya terdiri dari orang Yunani dan Romawi yang sudah lebih dahulu mempunyai kebiasaan melarang poligami. Setelah mereka memeluk agama Kristen, kebiasaan dan tradisi nenek moyang mereka itu tetap mereka pertahankan.<sup>18</sup>

Dengan demikian, sistem monogami yang mereka praktekkan bukanlah murni berasal dari agama Kristen yang mereka anut, tetapi lebih merupakan tradisi yang diwarisi secara turun temurun sejak dahulu. Dari

---

<sup>16</sup>Lihat Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *Ta'addud al-Zaujatt min al-Nawahiy al-Diniyah wa al-Ijtima'iyah wa al-Qanūniyah*, diterjemahkan oleh Chadidjah Nasution dengan judul *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 80-102.

<sup>17</sup>Nasaruddin Umar, *Islam dan Masalah Poligami: Pemahaman Ali Syari'ati*, dalam *Melawan Hegemoni Barat: Ali Syari'ati Dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999), h. 199.

<sup>18</sup>Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 191.

tradisi tersebut, selanjutnya gereja menetapkan larangan poligami dan menggolongkan larangan tersebut sebagai aturan agama.<sup>19</sup>

Dr. Musfir al-Jahrani dalam bukunya *Nazarat fi Ta'addud al-Zaujat*<sup>20</sup> mengemukakan beberapa bentuk poligami yang pernah dipraktekkan pada masa sebelum datangnya Islam, yaitu seorang isteri memilih banyak suami (poliandri), gabungan poligami dengan poliandri, dan seorang suami memiliki banyak isteri (poligami).

a. Seorang isteri memiliki banyak suami (poliandri)

Seorang isteri yang mempunyai beberapa suami disebut dengan poliandri. Dalam sistem perkawinan poliandri ini di mana banyak kaum laki-laki boleh mengawini seorang perempuan, atau seorang isteri yang mempunyai banyak suami (banyak laki-laki yang menggaulinya).<sup>21</sup>

Menurut catatan sejarah, perkawinan semacam ini banyak terjadi di daerah selatan dan utara negara India dan di beberapa wilayah Rusia. Di daerah India, kakak beradik boleh mengawini secara bersama seorang wanita. Jika seorang kakak menikahi seorang wanita, maka saudara laki-laki (adik laki-lakinya) yang lain juga turut memiliki wanita tersebut (wanita yang dikawini oleh kakaknya).<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Lihat *ibid.*

<sup>20</sup>Musfir al-Jahrani, *Nasarat fii Ta'addud al-Zaujat*, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dengan judul *Poligami dari berbagai Persepsi* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 32.

<sup>21</sup>M. Ahnan dan Ummu Khoiroh, *Poligami di Mata Islam* (Cet. I; Surabaya: Putra Pelajar, 2001), h. 160. Lihat pula Musfir al-Jahrani, *op. cit.*, h. 32-33.

<sup>22</sup>Lihat *ibid.*



Di dalam komunitas masyarakat India, diperbolehkan seorang wanita memiliki lima, enam atau sepuluh orang suami. Bahkan ia boleh bersuami lebih dari sepuluh laki-laki dengan syarat laki-laki yang bersangkutan mempunyai saudara atau masih mempunyai hubungan kekerabatan. Perkawinan semacam ini menurut sejarah telah berkembang di masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Hal ini dapat dilihat pada riwayat berikut :

فى حديث ام المؤمنين عائشة بنت ابي بكر الصديق رضى الله عنهم، حيث تقول:  
كان يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة<sup>23</sup>.

Artinya :

‘Diceritakan dari Aisyah: ‘Kelompok laki-laki yang kurang dari sepuluh orang menggauli (mengawini) seorang wanita.’

#### b. Gabungan poligami dengan poliandri

Kalau poliandri adalah jenis perkawinan di mana seorang isteri boleh mengawini (menggauli) banyak laki-laki, maka poligami adalah jenis perkawinan dimana seorang laki-laki boleh memiliki banyak wanita (isteri). Selanjutnya perkawinan gabungan antara poligami dengan poliandri terjadi pada golongan tertentu dari laki-laki yang menggauli golongan tertentu dari wanita sebagai suami isteri dengan hak yang diakui antara mereka.<sup>24</sup> Perkawinan ini terjadi dalam masyarakat primitif, seperti masyarakat daerah pegunungan Tibet, pegunungan Himalaya India dan Australia. Di daerah tersebut tidak jarang pula terjadi seorang laki-laki

---

<sup>23</sup>Ali Abdul Wahid Wafi, *Qisāh al-Zawaj al-'Azūbah fī al-'Ilm* (al-Qahirah: t.t., t.th.), h. 58-60.

<sup>24</sup>Terjemahan penulis.



yang menggauli adik dan kakaknya sendiri. Perkawinan seperti ini mereka namakan sebagai perkawinan persaudaraan yang terbagi dalam dua jenis, yaitu :

- (1) Diperbolehkannya laki-laki mengawini beberapa wanita, baik saudara-nya sendiri maupun orang lain.
- (2) Diperbolehkannya seorang laki-laki mengawini saudaranya sendiri demi persaudaraan seperti yang terjadi di Kepulauan Polenesia dan India.

Di selatan India, yaitu pada masyarakat suku Taudan, jika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, maka wanita tersebut sekaligus menjadi isteri dari adik-adik suaminya, dan mereka juga sekaligus menjadi suami adik-adik wanita tersebut. Anak pertama yang lahir bernasab kepada saudara tertua, dan anak kedua bernasab kepada adiknya, dan begitulah seterusnya.<sup>25</sup>

#### c. Seorang suami memiliki banyak isteri (poligami)

Jenis perkawinan ini masih ada hingga sekarang, meskipun terdapat pro dan kontra sejak masa kemunculannya. Tidak ada data yang jelas manakah yang terlebih dahulu muncul dari ketiga bentuk poligami tersebut. Namun secara umum permulaan munculnya poligami diperkirakan hampir seusia umur manusia. Sejak ribuan tahun silam, poligami sudah berlangsung secara wajar, bukan saja oleh kalangan raja-raja dan nabi-nabi, tetapi juga pada semua tingkatan masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Lihat Musfir al-Jahrani, *op. cit.*, h. 34.

<sup>26</sup>Lihat Nasaruddin Umar, *op. cit.*, h. 198.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa poligami sudah ada sebelum Islam datang dan telah berkembang dalam setiap masyarakat yang berperadaban tinggi. Di Cina misalnya, seorang suami berhak mengawini seorang atau beberapa perempuan jika ternyata isteri pertama mandul, karena bagi mereka anak adalah tumpuan harapan yang dapat mewarisi berbagai hal setelah ayahnya meninggal dunia. Meskipun demikian, isteri-isteri lainnya tetap tunduk kepada isteri pertama. Di kalangan bangsa Mesir Kuno, poligami dianggap suatu hal yang wajar asalkan suami berjanji akan membayar sejumlah uang yang cukup banyak kepada isteri pertama setelah suaminya berpoligami.<sup>27</sup>

Sementara itu, bagi bangsa Timur Kuno, seperti Babilonia, Madyan atau Syiria beranggapan bahwa poligami merupakan perbuatan yang suci. Penilaian tersebut adalah karena para raja dan penguasa yang menempati posisi suci dalam hati mereka, juga melakukan poligami.<sup>28</sup>

Di kalangan bangsa Arab sebelum islam tidak ada pembatasan mengenai jumlah isteri yang dapat dimiliki. Para pemuka dan pemimpin mempunyai banyak isteri untuk menjalin hubungan dengan keluarga-keluarga lainnya. Praktek pembujukan keluarga lain dan aliansi politik melalui perkawinan, dipraktekkan dalam masyarakat-masyarakat feodal lainnya dalam skala yang sangat besar.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Lihat Musfir al-Jahrani, *op. cit.*, h. 35.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Lihat Ali Ashgar Engineer, *The Rights of Women in Islam*, dialihbahasakan oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf dengan judul *Hak-hak Perempuan Dalam Islam* (Cet. I: Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), h. 29.

Dalam *Sunan Ibnu Majah* dikemukakan bahwa Ghailan bin Salamah ketika baru memeluk Islam, memiliki sepuluh orang isteri. Demikian pula Qais bin al-Hāris memiliki delapan orang isteri.<sup>30</sup> Sedangkan Imam al-Tabari dalam tafsir *jami' al-Bayan* mengemukakan bahwa seorang anggota suku Quraisy rata-rata mempunyai lebih dari seorang isteri. Di antara mereka ada yang mengawini empat, lima, enam atau bahkan sepuluh wanita.<sup>31</sup>

## 2. Praktek poligami pada masa Rasul

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya, ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat kaum perempuan terhormat, maka poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.<sup>32</sup>

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan (QS. al-Nisā (4): 3) nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan-perubahan tersebut antara lain :

*Pertama*, membatasi jumlah bilangan isteri hanya sampai empat.

---

<sup>30</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan, t. th.), h. 628.

<sup>31</sup>Al-Tabari, *Jami' al-Bayan* (al-Qahirah: t.p., 1975). h. 534-535.

<sup>32</sup>Lihat Qāsim Āmin, *Tahrīr al-Mar'ah* (Tunis: Dār al-Ma'arif. 1990), h. 155-156.

Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut, di antaranya riwayat dari Qais bin Sabit :

... اسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال  
اختر منهن اربعا.<sup>33</sup>

Artinya :

"Ketika masuk Islam, aku punya delapan isteri. Aku menyampaikan hal itu kepada Rasul dan beliau berkata: "Pilih dari mereka empat orang."<sup>34</sup>

Riwayat serupa dikemukakan oleh Ghailan bin Salamah al-Saqafi:

أن النبي قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد اسلم وتحتة عشرينسوة: اختر منهن اربعا  
وفارق سائرهن.<sup>35</sup>

Artinya :

'Bahwa Nabi saw. berkata kepada Ghailan bin Umayyah al-Šaqafi yang masuk Islam, padahal ia mempunyai sepuluh orang isteri. Beliau bersabda kepadanya: "Pilihlah empat orang di antara mereka, dan ceraikanlah yang lainnya."<sup>36</sup>

*Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi orang yang berpoligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Hal tersebut dimaksudkan agar kaum laki-laki

<sup>33</sup>Abū Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 499.

<sup>34</sup>Terjemahan penulis.

<sup>35</sup>Abū Daud, *op. cit.*, h. 628.

<sup>36</sup>Terjemahan penulis.

tidak berlaku sewenang-wenang terhadap isteri mereka. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل مع أحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة واحد شقيه ساقطاً (رواه الترمذی).<sup>٣٧</sup>

Artinya :

‘Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: Apabila ada seorang laki-laki mempunyai dua orang isteri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan badannya miring.’

Dengan demikian, tampak bahwa praktek poligami pada masa datangnya islam sangat berbeda dengan praktek poligami yang ada sebelumnya. Perbedaan tersebut menonjol pada dua hal, yaitu pada bilangan isteri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak isteri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. Selanjutnya syarat mampu berlaku adil. Sebelumnya poligami tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Lihat al-Turmuziy, *Sunan al-Turmuziy*, Juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 633. Lihat pula Ibnu al-Aṣīr, *Jamī' al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: t. p., t. th.), h. 515.

<sup>38</sup>Lihat Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 5.

Praktek poligami pada masa Rasulullah saw. sering disalahtafsirkan, termasuk oleh umat muslim sendiri. Adanya anggapan bahwa Nabi saw. melakukan poligami dengan tujuan untuk memenuhi tuntunan biologis semata sebagaimana dilakukan oleh banyak orang. Kekeliruan pemahaman mengenai praktek poligami Nabi ini perlu diluruskan, terutama karena praktek poligami Nabi seringkali dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat muslim.

Untuk dapat memahami makna poligami Nabi secara benar, seseorang terlebih dahulu harus mampu memahami dan menghayati perjalanan hidup pribadi Nabi saw. Diketahui secara luas bahwa jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, figur Muhammad telah dikenal di kalangan masyarakat Arab sebagai orang yang paling alim dan paling jujur sehingga digelar *al-Amin*. Berbeda dengan pemuda lain pada masanya, Muhammad saw. tidak terpengaruh sedikit pun pada tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab yang senang meminum minuman keras, berjudi dan berzina.<sup>39</sup>

Nabi menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid ketika berusia 25 tahun, sementara Khadijah berumur 40 tahun. Melihat perbedaan usia keduanya yang relatif sangat jauh, lalu membandingkannya dengan peraturan perkawinan di negara-negara yang berpenduduk Muslim termasuk di Indonesia, terasa ada suatu keanehan. Dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam ditetapkan usia laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Sementara itu, usia Nabi saw. pada saat melangsungkan

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 18.

pernikahan pertama kalinya sangat jauh berbeda dengan usia calon isterinya, dan yang terjadi pun sebaliknya, yang seharusnya berusia lebih muda adalah wanitanya.

Sejarah mencatat betapa bahagianya perkawinan Nabi dengan Khadijah itu. Pasangan tersebut dianugerahi enam orang anak, 4 perempuan dan 2 anak laki-laki, namun kedua anak laki-lakinya itu meninggal ketika masih kanak-kanak. Sampai Khadijah wafat, Nabi tidak menikah lagi.<sup>40</sup>

Perkawinan monogami ini dijalani Nabi selama 28 tahun, 17 tahun pada masa sebelum kerasulan (*qabla bi'sah*) dan 11 tahun sesudah kenabian (*ba'da bi'sah*).<sup>41</sup> Dua tahun setelah Khadijah wafat, barulah Nabi menikah lagi,<sup>42</sup> yaitu dengan Saudah bint Zam'ah.<sup>43</sup> Saudah adalah perempuan pertama yang dinikahi Nabi setelah Khadijah dan ketika itu usia Saudah sudah agak lanjut. Tidak lama setelah itu, Nabi menikah lagi dengan Aisyah binti Abu Bakar. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi lebih dahulu mengikat perjanjian perkawinan dengan Aisyah, tetapi

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 20.

<sup>42</sup>Menurut catatan sejarah bahwa Nabi saw. melakukan poligami setelah usia 54 tahun, yang biasanya pada usia itu kemampuan seksual laki-laki sudah mulai menurun. *Ibid.*, h. 21.

<sup>43</sup>Perkawinan Nabi saw. dengan Saudah binti Zam'ah ini adalah semata-mata untuk melindungi perempuan tua ini dari keterlantaran dan tekanan keluarganya yang masih musyrik. Suami Saudah, Sakran ibn Amr, adalah sahabat yang menyertai Nabi saw. dalam perjalanan hijrah ke Abbesinia. Dalam riwayat dijelaskan karena usia Saudah sudah lanjut, ia tidak mempunyai hasrat lagi kepada laki-laki. Saudah menerima lamaran Nabi karena berharap akan dibangkitkan di syurga nanti bersama isteri-isterinya yang lain. Itulah sebabnya, ia dengan sukarela memberikan "gilirannya" kepada Aisyah. Lihat Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Cet. XVI; Bogor: Pusaka Litera Antar Nusa, 1993), h. 326.



kesebelas isterinya itu Nabi tidak lagi dikaruniai anak. Data ini cukup menjelaskan bahwa alasan Nabi saw. berpoligami sangat jauh dari tuntutan biologis sebagaimana yang dipersepsikan banyak orang.<sup>46</sup>

Perkawinan-perkawinan yang dilakukan Nabi pada tahun-tahun terakhirnya adalah dimaksudkan untuk menyatukan hati dan melunakkan sikap berbagai kabilah. Perkawinan itu pun dijalani Nabi saw. semata-mata atas petunjuk Allah swt. dengan berbagai maksud yang suci dan mulia.<sup>47</sup>

Hal lain yang sangat menarik untuk direnungkan berkaitan dengan praktek poligami yang dilakukan oleh Nabi saw. adalah bahwa Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Selain Nabi mengawini perempuan-perempuan yang sudah berusia lanjut –selain Aisyah- juga Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh dengan aktivitas pengabdian, perjuangan, perang jihad demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani.

Gambaran di atas menunjukkan poligami yang dilakukan Nabi saw. didasarkan pada suatu prinsip yang mulia, yaitu untuk motivasi dakwah dan kepentingan penyiaran Islam. Ini membuktikan bahwa praktek poligami Nabi saw. sangat berbeda dengan praktek poligami oleh masyarakat pada umumnya, yang lebih mementingkan pemenuhan biologis semata dan terkadang melupakan unsur keadilan di dalamnya.

---

<sup>46</sup>Tidak sedikit tuduhan yang dialamatkan kepada Nabi sehubungan dengan poligami yang dilakukannya. Kaum orientalis misalnya, melemparkan tuduhan bahwa poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. hanyalah untuk tujuan memenuhi tuntutan biologis dan hasrat seksualnya. Lihat *ibid.*

<sup>47</sup>Lihat Ahmad al-Syarbasi, *op. cit.*, h. 87.

### BAB III

## HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TENTANG POLIGAMI

### ***A. Poligami dalam Hukum Islam***

Orang-orang Barat menilai bahwa poligami adalah sebuah cacat dan kegagalan dalam hukum Islam. Padahal poligami yang ditetapkan oleh Islam bertujuan untuk menanggulangi dan memperbaiki keadaan manusia. Olehnya itu, setiap muslim harus menyadari bahwa poligami pada hakikatnya merupakan institusi yang patut dibanggakan dalam Islam. Inilah jalan keluar yang ditawarkan Islam untuk menyelesaikan persoalan pelik yang dihadapi oleh seluruh umat di dunia. Persoalan ini memang hanya bisa diselesaikan dengan kembali kepada ajaran Islam.

Berbicara mengenai poligami dalam tinjauan hukum Islam, tentu tidak terlepas dari pendapat para ulama. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan diuraikan beberapa pandangan ulama, yang pada garis besar dapat digolongkan menjadi tiga pendapat sebagai berikut:

#### **a. Golongan yang menolak**

Golongan yang menolak berpendapat bahwa :

- (1) Pada prinsipnya Islam menganut asas monogami dan tidak mentolerir keberadaan poligami.
- (2) Praktek poligami merupakan perpanjangan dari tradisi Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan yang dominan kepada kaum laki-laki (*malecentris*).

(3) Mustahil seseorang dapat berlaku adil, sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan poligami. Hal ini dapat dilihat pada QS. al-Nisa (4): 3 disyaratkan adanya kemampuan berlaku adil, sementara dalam ayat 129 memustahilkan seseorang untuk dapat berlaku adil. Dengan demikian, sebenarnya poligami itu dilarang dalam Islam.

(4) Pada dasarnya poligami itu terlarang, kecuali dalam keadaan darurat, baik *darurah fardiyah* (individuil) maupun *darurah ijtimai'iyah* (sosial).<sup>1</sup>

Adapun dalil yang mereka kemukakan dalam menguatkan argumennya adalah sebagai berikut :

(1) QS. al-Nisa (4): 3 :

Dalam ayat ini, menurut mereka, Allah melarang poligami karena khawatir mereka tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim.

(2) Pada dasarnya Islam menghendaki monogami. Poligami hanyalah pengecualian atau *isytihsna*. Meskipun demikian, pengecualian itu tidak dapat dilakukan kecuali dalam kondisi terpaksa atau darurat. Pintu darurat dapat terbuka jika ada bukti dan alasan yang kuat.<sup>2</sup>

(3) Sesungguhnya poligami itu bukanlah dibolehkan tanpa syarat sebagaimana dipahami dari QS. al-Nisa (4): 3. Dalam ayat tersebut Allah mengkhawatirkan tindak kezaliman bagi mereka yang berpoligami.

<sup>1</sup>*Darurah fardiyah* adalah isteri dalam keadaan sakit, mandul, atau ia terserang sesuatu yang dapat mengurangi cumbu rayu (*Istimna*) sang suami terhadapnya, sedangkan *darurah ijtimai'iyah* adalah banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat peperangan maupun bencana alam. Lihat Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw.: Poligami dalam Islam vs. Monogami Barat*, alihbahasa Ilyas Ismail al-Sendany (Cet. I; Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 19.

<sup>2</sup>Lihat Abduttawab Haikal, *op. cit.*, h. 20.

Dengan demikian, jelas bahwa poligami hanyalah suatu *rukhsah* (kemurahan) Allah semata-mata. Meskipun sifatnya *rukhsah*, namun tidak begitu saja dapat dilakukan tanpa ada alasan dan keperluan yang mendesak.<sup>3</sup>

(4) Adanya syarat yang ketat dalam berpoligami yang bertujuan untuk menghilangkan efek yang akan ditimbulkan, sekurang-kurangnya dapat mengurangi angan-angan orang untuk memperbanyak isteri.<sup>4</sup>

Dari beberapa pandangan dan alasan yang diuraikan di atas, baik dari golongan yang ekstrim maupun yang moderat, dapat dianalisis bahwa argumen yang mereka kemukakan cukup lemah. Hal tersebut dikarenakan pendapat yang menyatakan bahwa dua ayat (QS. al-Nisa (4): 3 dan 129) adalah dalil yang mengharamkan poligami, tidak didukung oleh petunjuk nash yang kuat.

Untuk membuktikan kelemahan argumen yang diajukan oleh kelompok ekstrim, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

(1) Sifat adil yang menjadi syarat dibolehkannya poligami pada ayat pertama tidak sama dengan sifat adil yang dimaksudkan dalam ayat kedua, di mana setiap orang tidak akan mampu melakukannya. Penafsiran seperti ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Ubaidah al-Samani.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Muhammad ibn Qudāmah, *Al-Mugni*, Jilid VII (Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 316.

Adil dalam ayat pertama adalah adil yang dapat dilakukan (terjangkau), seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Adil dalam kategori tersebut merupakan suatu tanggungjawab dan perintah yang harus dilaksanakan. Sedangkan adil yang dimaksudkan pada ayat kedua, dimana tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya, termasuk Nabi saw.: adalah adil yang bersifat maknawi, yaitu berkaitan dengan kecenderungan hati dan berada di luar kemampuan manusia, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abū Bakar ibn Araby.<sup>6</sup> Dengan demikian, adil dalam hal tersebut bukanlah suatu taklif, karena kecenderungan hati dan jiwa berada di luar kemampuan manusia.

(2) Dalam ayat kedua, setelah ungkapan *ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء*, Allah menyambung ayat tersebut dengan larangan *فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة*. Ungkapan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa adil yang tidak dapat dijangkau manusia adalah adil dalam arti *al-hub al-qalbi* atau cinta seks atau adil yang berkaitan dengan immaterial.<sup>7</sup> Karena : cinta yang sejati tentu saja tidak dapat dibagi, sedangkan larangan untuk tidak terlalu cenderung dapat dipahami bahwa sebagian kecenderungan dapat dimaafkan, karena tidak ada kemampuan untuk mengendalikan. Nabi saw. sendiri dalam hal ini telah mengakui

---

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alihbahasa Muhammad Thalib, Jilid IV (Cet. XV; Bandung: PT. Al-Ma'arif, t. th.), h. 172.

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*: (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1994), h. 201.

keterbatasan beliau yang merasakan kecenderungannya yang lebih terhadap Aisyah r.a. daripada isteri-isterinya yang lain dalam segala hal.

(3) Anggapan bahwa poligami itu dilarang, dengan alasan bahwa Allah telah memperbolehkan poligami dengan syarat adil, namun di ayat lain Allah menafikan kemampuan seseorang untuk berlaku adil yang justru menjadi syarat kebolehan untuk berpoligami ditentang oleh Musfir al-Jahrani,<sup>8</sup> bahkan A. Hamid Kisyik menyatakan sebagai sebuah kesalahan yang sangat fatal.<sup>9</sup>

Menurutnya, bila hal itu benar, maka terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya, sehingga terkesan bahwa beberapa ayat Alquran menentang ayat lainnya, dan hal tersebut adalah sebuah kesia-siaan belaka. Menurut Abū Zahrah, meniadakan atau melarang poligami berarti telah melarang sesuatu yang sungguh bertentangan dengan fakta sejarah.

(4) Rasulullah saw. adalah mediator yang menjelaskan Alquran, baik melalui perbuatan maupun perkataan. Beliau adalah mediator Tuhan yang bertugas menyampaikan halal haramnya sesuatu, dan dalam prakteknya beliau juga berpoligami.

---

<sup>8</sup>Musfir al-Jahrani, *Nasarat fi Ta'addud al-Zaujat*, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dengan judul *Poligami dari berbagai Persepsi* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 58.

<sup>9</sup>Lihat A. Hamid Kisyik, *Bina' al-Ushrah al-Muslimah: Mausū'ah al-Zawaj al-Islami*, diterjemahkan oleh Ida Nursida dengan judul *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Cet. I; Bandung: al-Bayan, 1995), h. 16.

Untuk menolak pendapat golongan moderat yang menyatakan poligami itu sebenarnya terlarang kecuali darurat, maka berikut ini dikemukakan pandangan dari Abuttawab Haikal<sup>10</sup> bahwa :

- (1) Pendapat yang menyatakan bahwa poligami dilarang, harus menunjukkan dalil syar'i, karena pendapat tersebut terkait dengan hukum syar'i, sedang hukum syari'ah sendiri –menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf- tidak dapat diterima sebelum adanya dalil syar'i yang mendukungnya. Sementara, dalil syar'i, baik dari Alquran maupun hadis secara tegas menyatakan bahwa poligami itu adalah halal dan tidak dilarang.
- (2) Alquran tidak menerangkan bahwa azas perkawinan adalah monogami atau poligami. Alquran hanya menerangkan bahwa poligami itu boleh dengan batas dua, tiga atau empat. Bila seseorang takut berlaku aniaya, maka cukup baginya satu orang isteri saja.
- (3) Rasulullah saw. setelah turunnya ayat yang menerangkan poligami, memerintahkan kepada para sahabat yang memiliki isteri lebih dari empat orang agar menceraikannya, hingga tersisa empat orang saja.
- (4) Adanya persyaratan yang ketat dapat memperkecil dampak negatif poligami, adalah sulit dibenarkan. Ada alasan yang kuat maupun tidak, dampak atau efek samping itu selalu ada, misalnya pertengkaran atau perselisihan di antara anak-anaknya. Demikian pula persyaratan yang ketat dapat mengurangi minat seseorang untuk beristeri banyak tidak

---

<sup>10</sup>Lihat Abuttawab Haikal, *op. cit.*, h. 21-22.

dapat dibenarkan sepenuhnya, sebab persyaratan yang ketat tersebut justru menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kehancuran.

Memang diakui bahwa pada umumnya praktek poligami akan mempunyai dampak negatif, akan tetapi tidakkah dampak negatif itu akan lebih besar lagi jika poligami dilarang. Karena itu, seharusnya dipilih kebolehan poligami yang kerugiannya lebih kecil, dengan berpijak pada asas hukum “memilih mana yang lebih ringan dari dua kerugian yang timbul dari satu perbuatan.”

#### b. Golongan yang mendukung

Golongan yang mendukung poligami berpendapat antara lain bahwa poligami dalam Islam adalah suatu keniscayaan. Mereka beralasan bahwa poligami adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, baik dalam sejarah panjang umat manusia maupun dalam sejarah dunia Islam.

Untuk mendukung pendapatnya, golongan ini menjadikan QS. al-Nisā (4): 3 sebagai dalil tentang kebolehan orang untuk berpoligami. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut berkenaan dengan jumlah yang ditetapkan.

Berkaitan dengan jumlah wanita yang dibolehkan dalam poligami, terdapat empat pendapat yang berbeda dengan ijma' kaum muslimin, yaitu :

(1) Kelompok yang membolehkan poligami sampai 9 orang isteri.

Kelompok ini menafsirkan ayat : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع menunjukkan bolehnya poligami sampai 9 orang isteri, dengan



alasan bahwa huruf *waw* pada ayat tersebut adalah huruf *ataf* (kongjungsi) berarti *al-jam'u* (menggabungkan). Dengan demikian, kalimat *مثنى وثلاث وربع* berarti deret tambah dari  $2+3+4=9$ .<sup>11</sup> Argumen ini mereka perkuat dengan praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang mempunyai 9 orang isteri. Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi orang yang ingin berpoligami sampai 9 orang untuk mengikuti sunnah Nabi saw.

Golongan yang menafsirkan bahwa batasan berpoligami sampai 9 isteri adalah kaum Rafidhah dan sebagian Ahli Dhahir. Mereka memahami kata *masna* (dua-dua) sama artinya dua ditambah dua, begitupula dengan kata *Sulasa* (tiga-tiga) dan *ruba'a* (empat-empat) sama dengan tiga ditambah tiga dan empat ditambah empat.<sup>12</sup>

Sementara itu, al-Zamakhshariy<sup>13</sup> menafsirkan QS. al-Nisa (4): 3 dengan berpendapat bahwa apabila takut tidak bisa berbuat adil dalam memberikan hak-hak anak yatim, maka jauhilah menikahi mereka.

<sup>11</sup>Lihat Musfir al-Jahrani, *op. cit.*, h. 53, A. Rahman I. Doi, *Syari'ah The Islamic Law* diterjemahkan oleh Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman dengan judul "*Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 53 dan Nasaruddin Umar, *Islam dan Masalah Poligami: Pemahaman Ali Syari'ati dalam Melawan Hegemoni Barat; Ali Syari'ati Dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999), h. 207.

<sup>12</sup>Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alihbahasa Muhammad Thalib, Jilid IV (Cet. XV; Bandung: PT. al-Ma'arif, t. th.), h. 149.

<sup>13</sup>Ia adalah Abū al-Qasim Jarullah Mahmud ibn 'Umar ibn Muhammad ibn Ahmad ibn 'Umar al-Khuwarizmi al-Zamakhshariy. Lahir pada hari Rabu tanggal 27 Rajab 467 H. bertepatan dengan tahun 1074 M di Zamakhsyar, Turkestan, Rusia. Lihat, Lihat Amin al-Khuliy, *Kasyshaf al-Zamakhshariy* (Mesir: Maktabah al-Ushrah, t.th.), h. 5, Muni' Abdul Halim Mahmud, *Manahij al-Mufasssirun* (Beirut: Dar al-Kutub, 1978), h. 105, Ibrahim Dasuqy, "Sekilas tentang Riwayat Pengarang" dalam al-Zamakhshariy, *al-Kasyshaf*, Jilid IV (Teheran: Intisyarat Afataba, t. th.), h. 307, H.A.R. Gibb dan J. H. Kraemers, *Shorter Encyclopedia of Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1974), h. 654.

Demikian pula kalau takut berbuat zina, maka nikahlah dengan wanita yang halal bagimu. Dengan kata lain, arti kata طاب dalam ayat diartikan dengan halal.<sup>14</sup>

Dalam menafsirkan kata مثنى وثلاث وربع, al-Zamakhshariy berpendapat bahwa kata sandang (huruf *ataf*) *waw* berfungsi sebagai penjumlah (*li al-jam'i*). Maka jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil adalah sembilan.<sup>15</sup>

## (2) Kelompok yang membolehkan poligami sampai 18 orang

Kelompok ini memahami QS. al-Nisa (4): 3 sama dengan kelompok pertama. Perbedaannya terletak hanya pada penafsiran mereka mengenai *lafaz mufrad* atau bilangan yang diulang-ulang dengan huruf *waw* di antara kalimat مثنى وثلاث وربع adalah deret tambah dari  $2+2+3+3+4+4=18$ .<sup>16</sup> Oleh karena itu, makna ayat tersebut menurut mereka adalah "...Kawinilah olehmu wanita yang kamu sukai; dua-dua (4) plus tiga-tiga (6) plus empat-empat (8)..." Jadi jumlah secara keseluruhan adalah 18 orang.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian Ahli Dhahir memahami kata dengan dua ditambah dua, tiga ditambah tiga, dan empat ditambah empat, sehingga batas maksimal isteri yang boleh dinikahi adalah 9 orang. Dan sebahagian lainnya malah membolehkan poligami

---

<sup>14</sup>Lihat al-Zamakhshariy, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyūn al-Aqawil fi Wujūh al-Ta'wil* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966), h. 496-497.

<sup>15</sup>Lihat *Ibid*.

<sup>16</sup>Musfir al-Jahrāni, *op. cit.*, h. 53.

sampai 18 orang. Mereka berpendapat bahwa huruf waw menunjukkan arti jumlah. Jadi dengan demikian ayat tersebut maknanya sama dengan  $2+2+3+3+4+4=18$ .<sup>17</sup>

### (3) Kelompok yang membolehkan poligami tanpa batas

Sebagaimana kelompok pertama dan kedua, kelompok ini menafsirkan ayat yang sama sebagai kebolehan untuk berpoligami, hanya saja menurut kelompok ini berpoligami dibolehkan tanpa ada batasan berapa jumlah isteri yang ingin dimadu. Mereka menafsirkan ungkapan **ما طاب لكم** dalam ayat tersebut mengandung pengertian umum, sedangkan ungkapan **مثنى وثلاث وربع** merupakan kata-kata pengganti dari bilangan yang disebut berulang-ulang tanpa batas. Bilangan-bilangan tersebut disebutkan setelah ungkapan yang bersifat umum sekedar memberikan contoh dan bukan memberikan batasan.<sup>18</sup> Dengan demikian tidak ada batasan jumlah dalam hal poligami.

Perintah yang terdapat pada ayat tersebut sama dengan perkataan kepada seseorang: Minumlah kamu dua gelas, tiga gelas atau empat gelas atau ambillah buku di perpustakaan dua buku, tiga buku atau empat buku. Penyebutan bilangan dalam contoh ini bukanlah terbatas hanya sampai empat, mungkin lima, enam atau tujuh, sesuai dengan yang diinginkan oleh yang melakukannya.

Pengertian seperti itu dikaitkan pula dengan ayat yang juga memiliki pengertian umum sebagaimana dalam QS. Fathir (35): 1.

---

<sup>17</sup>Lihat Sayyid Sābiq, *loc. cit.*

<sup>18</sup>Lihat Abuttawab Haikal, *op. cit.*, h. 29.

Menurut penafsiran mereka, bilangan-bilangan yang disebutkan dalam ayat tersebut bukanlah menunjukkan jumlah yang terbatas, tetapi menunjukkan cakupan yang sangat umum. Dengan demikian, cakupan ayat tentang perintah poligami sangat umum sehingga tidak menunjukkan ketentuan tentang jumlah yang pasti. Oleh sebab itu, berapapun jumlah yang diinginkan oleh seorang laki-laki untuk dijadikan isteri tidak dilarang dalam agama dengan syarat mampu memenuhi syarat adil.

(4) Kelompok yang membolehkan poligami dengan batas maksimum empat.

Kelompok ini berpendapat bahwa mengawini lebih dari empat orang secara bersamaan tidak dibenarkan dan hubungan seks dengan perempuan kelima hukumnya zina. Demikian pula anak-anak yang lahir daripadanya dikategorikan anak zina dan tidak sah mewarisi ayahnya.<sup>19</sup>

Adapun alasan yang mereka kemukakan berdasarkan tiga sumber hukum berikut :

#### (1) Alquran

Pada dasarnya Alquran tidak melarang poligami, tetapi hanya meluruskan dan membatasi poligami yang sudah berkembang dan menjadi kebiasaan orang-orang pada waktu itu tanpa mengenal batas. Batasan yang diberikan Alquran meliputi dua hal, yaitu : *Pertama*, batasan yang bersifat kuantitatif, yaitu bahwa poligami tidak dibenarkan lebih dari empat orang isteri. Batasan ini menjadi syarat sahnya akad nikah.

---

<sup>19</sup>Lihat Nasaruddin Umar, *op. cit.*, h. 206.

Barangsiapa yang mengawini wanita lebih dari yang sudah ditetapkan oleh Alquran, maka perkawinannya dipandang tidak sah dan mesti *difasakh* (rusak).<sup>20</sup> *Kedua*, adalah batasan yang bersifat kualitatif, yaitu ketentuan yang ditetapkan dalam memiliki isteri lebih dari satu dapat dilakukan dengan syarat dapat berlaku adil. Batasan kualitatif ini tidak dijadikan syarat sahnya perkawinan. Bagi mereka yang mengawini wanita sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat, sedang ia khawatir berbuat aniaya, maka perkawinannya tetap dipandang sah. Hanya saja ia berdosa jika benar-benar berbuat zalim.<sup>21</sup>

(b) Al-Sunnah

Setelah turunnya ayat yang melarang poligami lebih dari empat orang, juga ditemukan beberapa hadis Nabi saw. yang memerintahkan laki-laki yang memiliki isteri lebih dari empat untuk menceraikannya. Munculnya hadis Nabi terkait dengan beberapa kasus sahabat, seperti :

- Qāis ibn Sābit yang memadu delapan orang isteri, hadisnya adalah :

اسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر  
منهن اربعا.<sup>22</sup>

Artinya :

“Ketika masuk Islam, aku punya delapan isteri. Aku menyampaikan hal itu kepada Rasul dan beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang.”<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Lihat Abuttawab Haikal, *op. cit.*, h. 44.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Abū Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 499.



- Ghailan ibn Salamah sepuluh orang isteri, hadisnya berbunyi :

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَغَيْلَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الثَّقَفِيِّ وَقَدْ اسْلَمَ وَتَحْتَهُ عِشْرُونَ سَوَةً: أَخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا  
وَفَارِقِ سَائِرَهُنَّ.<sup>24</sup>

Artinya :

'Bahwa Nabi saw. berkata kepada Ghailan bin Umayyah al-Saqafi yang masuk Islam, padahal ia mempunyai sepuluh orang isteri. Beliau bersabda kepadanya: "Pilihlah empat orang di antara mereka, dan ceraikanlah yang lainnya.'<sup>25</sup>

(c) ijma'

Ulama Islam telah bersepakat tentang batas maksimal dengan empat orang isteri, baik umat terdahulu maupun umat belakangan (kecuali kelompok yang menolak).

Ulama klasik yang berpandangan demikian antara lain, Imam Syāfi'i, Ibnu Jarir al-jabari, al-Qurtubiy, dan Ibnu al-Qayyim. Imam Syafi'i setelah menerima hadis Ghailan menjelaskan bahwa hadis terkait mempunyai dua pengertian. *Pertama*, hadis itu menunjukkan bahwa batas poligami hanya empat orang saja. Haram hukumnya seorang muslim mengawini wanita lebih dari 4 orang. *Kedua*, menunjukkan bahwa hak pilih (*khiyar*) –untuk menentukan 4 orang isteri ddari isteri yang jumlahnya lebih dari itu- berada sepenuhnya di tangan sang suami.<sup>26</sup> Ibnu Jarjr al-

---

<sup>23</sup>Terjemahan penulis.

<sup>24</sup>Abū Daud, *op. cit.*, h, 628.

<sup>25</sup>Terjemahan penulis.

<sup>26</sup>Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 34.

jabari menafsirkan QS. al-Nis (4): 3 dengan mengatakan bahwa makna ayat tersebut merupakan kekhawatiran tidak mempunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka kalau sudah khawatir terhadap harta anak yatim, mestinya demikian juga khawatir terhadap wanita. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin dapat berbuat adil, satu sampai empat wanita. Sebaliknya, apabila ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil, ketika berpoligami, maka seseorang cukup menikahi seorang wanita saja. Bahkan kalau dengan itu pun masih khawatir, maka cukup dengan menikahi budak wanita yang dimiliki. Sebab dengan menikahi budak lebih memungkinkan tidak akan berbuat penyelewengan.<sup>27</sup>

Dalam memahami arti adil dalam ayat tersebut, al-Qurtubi berpendapat bahwa hal tersebut berkaitan dengan keharusan berbuat adil dalam hal kasih sayang, hubungan biologis, pergaulan, dan pembagian nafkah.<sup>28</sup>

Sementara itu, Ibn al-Qayyim menekankan pembahasannya pada kata *ذالك ادنى الا تعولوا*. Dengan mengutip pendapat al-Kasa'i, Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa poligami sampai empat dibolehkan dengan syarat dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan tidak berbuat aniaya. Sebaliknya, apabila tidak mampu berbuat adil atau bahkan akan

---

<sup>27</sup>Lihat Ibnu Jarir al-Jabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Fikr, 1398/1978), h. 155.

<sup>28</sup>Al-Qurtubi, *Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kitāb al-'Arabiyah, 1387/1967), h. 20.



menimbulkan aniaya, maka hendaklah seorang menikahi satu wanita saja atau budak.<sup>29</sup>

Abuttawab Haikal menanggapi pendapat golongan ini dengan mengemukakan beberapa argumennya,<sup>30</sup> yaitu :

(1) Tanggapan terhadap kelompok yang membenarkan poligami tanpa batas, antara lain :

- Bagi kelompok yang membenarkan poligami tanpa batas jelas tidak dapat dibenarkan, sebab dibolehkannya poligami seperti itu merupakan hal yang lumrah sebelum turunnya ayat yang membatasinya. Semua agama samawi sebelum datangnya agama Islam memang telah membolehkan poligami tanpa batas dan hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat pada masa itu sampai turunnya ayat di atas. Jadi jelas ayat tersebut turun bulan untuk menetapkan bolehnya poligami dengan jumlah seperti itu, sebab kalau hanya untuk hal yang demikian, Allah tidak perlu menurunkan ayat Alquran, tetapi cukup membiarkan kebiasaan tersebut berlaku. Ayat tersebut turun untuk memberikan batasan mengenai jumlah isteri yang boleh dimadu, hanya sampai empat saja.

Dalam hal ini terdapat dua batasan, yaitu batasan yang bersifat kuantitatif yang terdapat pada QS. al-Nisa (4): 3 dan batasan yang bersifat kualitatif sebagaimana dalam QS. al-Nisa (4): 129. Pengertian ini diperkuat oleh runtutan kata dalam ayat terkait. Terbukti, setelah ada

---

<sup>29</sup>Lihat Ibn al-Qayyim, *Tafsir ibn al-Qayyim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1408/1988), h. 219.

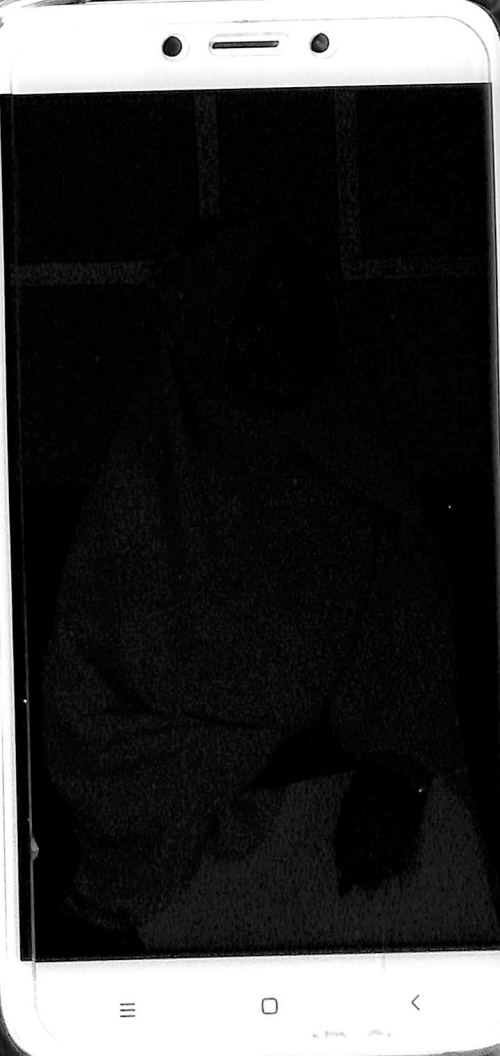
<sup>30</sup>Lihat Abuttawab Haikal, *op. cit.*, h. 30-32.



pembatasan: dua, tiga, atau empat dalam hal perkawinan, Allah kemudian menyebutkan *milk al-yamīn* secara mutlak. Pemutlakan atas *milk al-yamin* yang dikemukakan setelah ada *taqyid* (bataran) poligami hingga empat orang, jelas menunjukkan bahwa ayat terkait bermaksud untuk membatasi poligami –dengan empat orang isteri saja- bukan untuk menunjukkan bolehnya poligami tanpa batas seperti keadaan yang terjadi sebelum turunnya ayat.

- Pengertian umum yang diperoleh dari bentuk kata *ما طاب لكم من النساء* sudah dikhususkan oleh dua hal. *Pertama*, *mukhasis* yang bersifat maknawi. *Mukharrij* maknawi adalah kenyataan bahwa yang menjadi sasaran dari firman Allah adalah orang Islam. Sedangkan keadaan orang Islam adalah tidak suka akan hal-hal yang dilarang. Dan mengawini lebih dari empat adalah sesuatu yang tidak halal. *Kedua*, *mukhassis* yang bersifat *lafziy* adalah adanya keterangan (*wasaf*) pada kata *ما طاب لكم من النساء*, berupa bilangan *مثنى وثلاث وربع*. Ini merupakan kata-kata tunggal (*mufrad*) yang dipakai untuk menyebut bilangan yang berulang-ulang. Maka artinya : Kawinilah olehmu wanita-wanita yang halal bagimu, dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Dan kamu tidak boleh mengambil isteri lebih dari bilangan itu.

- Kalau menerima bahwa ayat *ما طاب لكم من النساء* menunjukkan *takmīm* (bilangan umum tanpa batas), maka tidak dapat diterima bahwa *takmīm*nya ayat tersebut bersifat *qat'iy dalalah*. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa ayat itu tidak menunjukkan *takmīm*, melainkan



menunjukkan *tahdid* (batasan) sampai bilangan yang tidak lebih dari empat.

(2) Tanggapan terhadap kelompok yang membenarkan poligami sampai 18 orang, antara lain :

Pendapat yang membenarkan hal tersebut adalah *syadz*, dan tidak mengikuti aturan dalam memahami bahasa Arab. Sebab yang menjadi *mukhātab* (sasaran pembicaraan) ayat terkait bukanlah seorang diri, melainkan semua orang. Hal ini dapat dibuktikan dari teks ayat-ayat sebelum dan sesudahnya yang berbicara untuk semua orang. Sedang *waw*, penghubung kata *مثنى وثلاث وربع* bukan berfaedah *jam'i*, juga bukan mengatakan bilangan, melainkan mengatakan (mengikutsertakan) *fi'il* (pekerjaan). Ayat Alquran tidak mungkin menyebut bilangan delapan belas dengan menggunakan tiga bilangan. Pemakaian seperti itu tentu saja bertentangan dengan struktur bahasa Arab yang baku dan berlaku.

(3) Tanggapan terhadap kelompok yang membolehkan poligami sampai 9 orang, antara lain :

Pemahaman mereka terhadap QS. al-Nisā (4): 3 tersebut adalah pemahaman yang salah. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa *waw*, penghubung kata *مثنى وثلاث وربع* bukan berfaedah *jam'i*, juga bukan mengatakan bilangan, melainkan mengatakan (mengikutsertakan) *fi'il* (pekerjaan).

Demikian pula, alasan yang dipergunakan adalah untuk mengikuti Sunnah Nabi saw. yang memiliki 9 orang isteri merupakan pendapat yang sulit diterima. Memang benar bahwa mengikuti perbuatan Nabi saw dalam

segala hal yang tidak terlarang adalah perintah agama. Namun dalam beberapa hal yang Allah khususkan untuk Nabi tidaklah dapat ditiru dan dilakukan oleh ummatnya.<sup>31</sup>

c. Golongan yang netral

Status hukum poligami, menurut golongan ini, adalah boleh (*mubāh*) menurut pengertian hukum. Artinya, setiap perbuatan *mubāh* atau yang dibolehkan menurut hukum akan tetap dilarang jika cenderung mengakibatkan terjadinya ketidakadilan serta perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Bagi golongan ini, dibolehkan beristeri lebih dari satu hanya bagi orang yang membutuhkan dan mampu memberikan nafkah dan menjaga kehormatan. Mengawini wanita lebih dari satu dapat menjadi suatu keharusan sosial terutama saat kaum pria lebih sedikit dari kaum wanita, atau kondisi objektif memungkinkan atau mengharuskan untuk itu.

Dengan demikian, golongan ini tetap mengakui praktek poligami sebagai jalan penyelesaian terhadap problematika sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. yakni banyaknya janda dan anak yatim akibat perang, sehingga

---

<sup>31</sup>Beberapa hal yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad saw. yaitu : (1) Dihalalkan bagi Nabi untuk mengawini wanita yang menyerahkan diri kepadanya tanpa wali dan mahar jika Nabi berkehendak menikahinya (QS. al-Ahzab (33): 50), (2) Nabi diperkenankan menggauli siapa yang dikehendaki dari isteri-isterinya dan menunda siapa saja dari mereka yang beliau sukai (QS. al-Ahzab (33) 51), (3) Nabi dilarang mengawini wanita lain selain dari isteri-isterinya yang sudah ada (QS. al-Ahzab (33): 52), (4) Isteri-isteri Nabi merupakan ibu bagi orang-orang mukmin, dan kalau ia menceraikan salah satu dari mereka atau Nabi meninggal, maka ia tidak halal bagi orang sesudah Nabi (QS. al-Ahzab (33): 6 dan 53). Selengkapnya baca Abuttawab Haikal, *op. cit.*, h. 40-41.

dikhawatirkan akan terabaikan bila mereka tidak diikat dalam suatu ikatan pernikahan.

## 2. Pandangan ulama kontemporer

Secara umum, dapat dikatakan bahwa ulama modern memperketat kebolehan melakukan poligami. Bahkan ada di antara mereka yang mengharamkannya, meskipun di balik keharaman tersebut masih disertai kondisi yang masih memberikan kemungkinan untuk melakukannya.<sup>32</sup>

Sejalan dengan pandangan para pemikir modern, dalam perundang-undangan yang sekarang berlaku di negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam pun, terkesan memberikan syarat yang cukup ketat untuk kebolehan melakukan poligami.

Alasan para pemikir modern untuk melarang menikahi wanita lebih dari satu, atau kalau pun membolehkannya diikuti dengan berbagai syarat yang hampir tidak mungkin dipenuhi oleh seorang suami, adalah ketidakmampuan suami untuk berlaku adil terhadap para isteri. Kemustahilan berbuat adil ini tertuang dalam QS. al-Nisā (4): 3, 127 dan 129). Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa arti kata '*adl*' dalam ayat di atas bermakna perlakuan adil terhadap para isteri dalam segala hal, yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Bukan saja dalam hal pengadaan akomodasi, seperti pakaian, makanan dan sebagainya, tetapi

---

<sup>32</sup>Lihat Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemia, 1996). h. 100-101.

juga dalam hal perasaan dan hati, seperti rasa cinta dan semacamnya yang berhubungan dengan kebutuhan batin isteri.<sup>33</sup>

Di antara pandangan ulama kontemporer yang akan dibahas di sini antara lain, imam al-Syawkani, al-Maragi, Sayyid Qutb, Ali al-Sabuni, Sayyid Ameer Ali, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Rihd, Fazlur Rahman, Mu'ammal Humaidy, dan Abdul Nasir Taufiq al-Attar.

Al-Syawkāni menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat mengenai poligami ini berhubungan dengan kebiasaan orang Arab pra-Islam, di mana para wali yang ingin menikahi anak yatim, tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada wanita lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara wanita yang yatim dan non yatim, Allah menyuruh untuk menikahi wanita yang non yatim saja, maksimal empat wanita, dengan syarat bisa berbuat adil. Sedang kalau takut tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu saja.<sup>34</sup>

Al-Marāgi berpendapat bahwa kebolehan berpoligami yang disebut dalam QS. al-Nisā (4): 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutny, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan.<sup>35</sup> Hubungannya dengan QS. al-Nisā (4): 129 adalah

<sup>33</sup>Lihat Sayyid Ameer Ali, *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideals of Islam with a Life of the Prophet* (Delhi: Jayyad Press, 1922), h. 229.

<sup>34</sup>Lihat al-Syawkāniy, *Fath al-Qadīr: Bayna Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, Jilid I (Beirut: Dār al-Fikr, 1393/1973), h. 419.

<sup>35</sup>Lihat al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, Juz IV (Mesir: Muṣṭafa al-Bāby al-Halabiy, 1382/1963), h. 181.

adanya usaha maksimal untuk berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu keharusan yang harus dilaksanakan manusia.<sup>36</sup>

Senada dengan pendapat al-Syawkāni dan al-Marāgi, Sayyid Qutub dan Muhammad Ali al-Ṣābūni mengatakan bahwa poligami itu hanya dibolehkan dalam keadaan darurat dengan syarat mampu berbuat adil dan batas maksimal isteri sampai empat saja.<sup>37</sup>

Sementara itu, Sayyid Ameer Ali berpendapat bahwa teori poligami digunakan apabila masyarakat menuntut adanya situasi yang demikian. Misalnya, ketika jumlah wanita terlalu banyak, maka poligami boleh saja diterapkan sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ameer Ali kemudian menambahkan bahwa keberadaan poligami mestinya harus dipahami sebagai tindakan yang sangat tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Artinya, pada suatu waktu dan kondisi tertentu, dalam suatu masyarakat misalnya, poligami menjadi sesuatu yang sama sekali tidak dibutuhkan, seperti dikarenakan kurangnya jumlah wanita. Dan bukan tidak mungkin, dengan kemajuan berfikir masyarakat akan mengubah keadaan dunia, dan kebutuhan terhadap poligami itu pun hilang.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Lihat *ibid.*, Juz V, h. 173.

<sup>37</sup>Lihat Sayyid Qutub, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz IV (t.tp.: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1961), h. 236 dan Muhammad Ali al-Ṣābūni, *Rawā'i'u al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Juz I (Mekkah: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1431/1972), h. 427-428.

<sup>38</sup>*Ibid.*

Dalam ungkapan yang berbeda, Fazlur Rahman mengatakan bahwa kebolehan mempunyai isteri lebih dari satu merupakan suatu pengecualian karena keadaan tertentu, seperti ketika terjadi perang, di mana banyak anak yatim dan janda yang ditinggal orang tua dan suaminya. Menurutnya, ada dua solusi memuaskan yang diberikan Alquran hubungannya dengan poligami. *Pertama*, bahwa poligami yang terbatas hukumnya boleh, *kedua*, kebolehan poligami diatur dengan sebuah moral berupa keadilan. Dengan ini, Alquran berharap agar suatu masyarakat berjalan sesuai dengan tuntutan zamannya.<sup>39</sup>

Berbeda dengan pendapat para modernis sebelumnya, Muhammad Abduh dengan tegas malah tidak membolehkan bahkan mengharamkan poligami. Menurutnya, poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan.<sup>40</sup> Abduh kemudian menambahkan bahwa poligami memang dibolehkan, tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Dengan syarat ini dapat dirinci dalam tiga kondisi, yaitu :

- 1) Kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman
- 2) Syarat bisa berlaku adil merupakan syarat yang sangat berat. Sampai-sampai Allah sendiri mengatakan, walaupun manusia berusaha keras untuk

---

<sup>39</sup>Fazlur Rahman, "A Survey of Modernization of Muslim Family Law", *International Journal of Middle East Studies II* (1980), h. 451-452.

<sup>40</sup>Muhammad Imārah, *Al-Imam Muhammad Abduh: Mujaddid al-Islam* (t.tp.: t.p., 1981), h. 240.



berbuat adil, manusia tidak akan mampu, khususnya dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin.

3) Bahwa seorang suami yang tidak bisa melakukan syarat-syarat yang dituntut untuk berpoligami, harus melakukan monogami.

Setelah menguraikan pentingnya kemampuan berbuat adil, Muhammad Abduh kemudian mengatakan bahwa dengan melihat beratnya syarat-syarat untuk melakukan poligami, maka tujuan utama dari syari'ah dalam perkawinan adalah monogami. Abduh menekankan bahwa seorang laki-laki tidak akan mampu berlaku adil dalam hal ini. Dia memang mengakui, para sahabat Nabi melakukan poligami, tetapi hal itu dilakukan karena kondisi yang mengharuskan demikian. Dalam hal ini Muhammad Abduh sependapat dengan Sayyid Ameer Ali, yakni **kebolehan poligami sangat tergantung pada kondisi, situasi, dan tuntutan zaman**. Oleh karena itu, konteks sejarah ketika turunnya ayat tentang **kebolehan berpoligami harus dibaca secara cermat dan jernih**. Dengan kata lain, walaupun Muhammad Abduh sangat keras dalam mengharamkan poligami, tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukannya, yakni manakala ada tuntutan yang benar-benar mengharuskan seseorang melaksanakannya.<sup>41</sup>

Bagi Abduh, poligami merupakan sesuatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan. Artinya, kalau alasannya dimaksudkan untuk **memenuhi kebutuhan biologis kaum Adam, maka**

---

<sup>41</sup>Lihat *ibid*.

hukumnya menjadi tidak boleh. Sebab, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan pernah puas, dan kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Dalam hal ini Abduh menghubungkannya dengan praktek poligami pra Islam yang lebih sering dilakukan sebagai simbol kekuatan atau kejantanan.<sup>42</sup> Latar belakang sejarah inilah yang membuat Muhammad Abduh sangat keras dan tegas dalam menetapkan hukum poligami.

Pemikir modern lainnya, Muhammad Rasyīd Ridā mengatakan bahwa melakukan poligami merupakan tindakan yang haram, kalau si suami takut tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Namun, di ayat lain telah dijelaskan perihal ketidakmampuan manusia berbuat adil (QS. al-Nisā (4): 129). Dengan demikian, bila dihubungkan dengan QS. al-Nisā (9): 129, kebolehan melakukan poligami merupakan sebuah tindakan yang benar-benar darurat atau sangat terpaksa.<sup>43</sup>

Dalam mengemukakan pendapatnya mengenai QS. al-Nisā (4): 3, Mu'ammal Humaidy mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak perempuan yatim yang berada di tangan pria, dan si pria hendak mengawininya tanpa melakukan keadilan dalam hal mahar. Lalu mereka dilarang mengawini anak yatim sebelum dapat berlaku adil dengan memberikan mahar kepadanya ketika menikahi, seperti ketika mereka mengawini perempuan lain.

---

<sup>42</sup> Muhammad Imārah, *Al-A'mal al-Kamilah*, Juz II (t.t.: t.p., 1972), h. 91.

<sup>43</sup> Lihat Muhammad Rasyīd Ridā, *Al-Manār*, Juz IV (t.t.: t.p., 1374), h. 348-349.

Humaidy memaparkan kebiasaan perkawinan masyarakat Arab pra-Islam yang melakukan poligami tanpa batas yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Dari kasus latar belakang ini, Humaidy menyimpulkan :

1. Bahwa Islam bukan menciptakan undang-undang poligami, tetapi hanya membatasi poligami dengan ketentuan dan jumlah tertentu
2. Alquran tidak menyuruh berpoligami, tetapi hanya membolehkan. Namun kebolehan di sini masih diancam dengan sebuah kondisi berupa ketidakmampuan untuk berlaku adil. Keadilan lebih ditekankan pada perasaan batin, seperti adil dalam hubungannya dengan cinta dan perasaan
3. Poligami merupakan solusi jaga-jaga, bukan sebaliknya membuat masalah. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di mana dan kapan obat ini dibutuhkan
4. Betapa pun jeleknya poligami barangkali masih lebih baik bagi masyarakat, perorangan maupun keluarga, daripada penggunaan hak secara membabi buta yang tidak diatur dengan poligami ini.<sup>44</sup>

Lain lagi pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Nāsir Taufiq al-Attar. Dengan merujuk pada pendapat Mahmud Syaltūt, ia mengatakan bahwa orang yang menafsirkan QS. al-Nisā (4): 129 sebagai isyarat haramnya poligami merupakan suatu pendapat yang aneh, dan sesuatu yang tidak pernah diutarakan Rasulullah saw. Juga tidak pernah diucapkan ulama-ulama Muslim, mulai dari masa Rasulullah saw. sampai masa modern sekarang ini.

---

<sup>44</sup>Mu'ammal Humaidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam* (t.tp.: t.p., 1980), h. 40-43.

Menurutnya, ayat ini tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya disebutkan “Mereka meminta fatwa kepadamu (ya Muhammad) mengenai masalah kaum wanita”...dan sesuatu yang ditanyakan itu ialah cara melaksanakan poligami serta menjaga hak-hak anak yatim dan hak-hak kaum wanita...! Maka Allah swt. memberikan fatwa kepada mereka: “Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah selalu mengetahuinya.

Karena kasus di ataslah, QS. al-Nisā (4): 129 turun. Dan diteruskan dengan ayat selanjutnya yang menyatakan “Oleh sebab itu janganlah kamu cenderung kepada isteri yang kamu cintai, sehingga membiarkan yang lain terkatung-katung, dan kalau kamu berbuat baik dan bertaqwa, maka Allah Maha Pengampun Maha Penyayang”.

Menurut al-Aṭṭar, maksud ayat ini adalah agar suami tidak berlaku berat sebelah yang mengakibatkan isteri yang lainnya menjadi tidak mendapat posisi yang jelas. Al-Aṭṭar melihat tuntutan adil di sini dalam bentuk dan sifat materi ketimbang kasih sayang dan kebutuhan batin.<sup>45</sup>

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan dua alasan kenapa pemikir kontemporer berusaha membatasi atau bahkan menghapuskan poligami :

1. Kebolehan mempunyai isteri lebih dari satu, sebagaimana disebutkan dalam Alquran, disertai dengan syarat yang tidak mungkin dapat dilakukan manusia, berupa berbuat adil terhadap isteri

---

<sup>45</sup>Lihat Abdul Nāsir Taufiq al-Aṭṭar, *Ta'addud al-Zaujāt min al-Nawāhiy al-Diniyah wa al-Ijtimā'iyah wa al-Qānūniyah*, dialihbahasakan oleh Chadidjah Nasution dengan judul *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan* (Cet. I: Jakarta: Bulan Bintang. 1976), h. 156.

2. Berdasar pada kontekstualitas sejarah di masa Nabi saw. dan sahabat, pelaksanaan poligami hanyalah pengecualian dari ketentuan umum, monogami. Pengecualian tersebut terjadi disebabkan adanya keadaan tertentu, yaitu ketika terjadi perang dan banyak anak yatim yang ditinggal orang tuanya.

3. Merupakan kelanjutan dari alasan pertama dan kedua, bahwa poligami sangat tergantung pada kondisi dan kemajuan berpikir suatu masyarakat.

Dan yang terpenting adalah bahwa keberadaan poligami lebih sebagai jalan keluar ketimbang menciptakan masalah. Dengan demikian, berbicara tentang poligami, bukan berarti mencoba menjawab pertanyaan antara monogami atau poligami, tetapi lebih merujuk pada kebutuhan kondisi yang ada.

### ***B. Poligami dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia***

Poligami merupakan satu kebutuhan dan tuntutan hidup. Ia bukan hukum baru yang diperkenalkan pertama kali oleh Islam. Hanya saja, praktek poligami sebelum Islam bersifat tanpa batas dan tanpa perikemanusiaan.<sup>46</sup> Islam datang dan menata ulang praktek ini. Oleh karena itu, seharusnya umat Islam bangga karena Islam telah memberikan jalan keluar bagi masalah sosial paling pelik yang dihadapi umat manusia.

---

<sup>46</sup>Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang poligami* (Cet. I: Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), h. 151.

Namun dalam kenyataan, tidak sedikit umat Islam yang malah kembali menyerang konsep mulia yang ditawarkan Islam ini. Bahkan dalam rangka menyejajarkan diri dengan orang-orang Kristen, banyak pakar hukum Islam yang mencabut ketentuan hukum poligami ini ataupun membatasinya dengan sejumlah persyaratan yang tidak ada dalam agama. Misalnya, harus ada izin dari isteri pertama, atau si suami harus membayar uang dengan jumlah yang sangat besar, atau harus mendapat izin dari hakim, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu bertujuan menghambat dan mencegah poligami.<sup>47</sup>

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan diatur dalam UU No. I Tahun 1974. Berdasarkan undang-undang tersebut, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita (pasal 3 (1) UU No. 1/1974). Hanya apa bila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan

---

<sup>47</sup>Lihat Muhammad Ali al-Šabūni, *al-Zawāj al-Islāmi al-Mubakkir: Sa'ādah wa Hašānah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nurdin dengan judul *Kawinlah Selagi Muda: Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri* (Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2000), h. 149.



diputuskan oleh pengadilan (pasal 3 (2), pasal 4 (1) dan (2), dan pasal 5 91) dan (2).<sup>48</sup>

Untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1/1974, maka dikeluarkan PP No. 9/1975, yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Untuk lebih lengkapnya, penulis kemukakan bunyi pasal dari UU No.1/1974 yang mengatur mengenai poligami dan segala ketentuan-ketentuannya,<sup>49</sup> yaitu :

- Pasal 3 (1) : Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) : Pengadilan, dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- Pasal 4 (1) : Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>48</sup>Lihat H. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992), h. 10.

<sup>49</sup>Ny. Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: UU No. 1/1974 tentang Perkawinan* (Cet. IV; Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 139-140; K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 53-54 dan H. Arso Sosroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 84-85.

- Pasal 5 (1) : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) : Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Demikian pula dapat dilihat PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan,<sup>50</sup> yaitu :

- Bab VIII : BERISTERI LEBIH DARI SEORANG
- Pasal 40 : Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.
- Pasal 41 : Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
- a. Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yaitu :
    - \* bahwa Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
    - \* bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    - \* bahwa Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
  - b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;

---

<sup>50</sup>Lihat *ibid.*, h.183-185; K. Wantjik Saleh, *op. cit.*, h. 82-83 dan H. Arso Sosroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi, *op. cit.*, h. 130-131.



- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
    - 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
    - 2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
    - 3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
  - d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
- Pasal 42 (1) : Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) : Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
- Pasal 43 : Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristeri lebih dari seorang.
- Pasal 44 : Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya ijin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

Perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai tata cara perkawinan dan segala seluk beluknya di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam. Adapun peraturan mengenai poligami dalam perundang-undangan tersebut dapat disebutkan antara lain<sup>51</sup> :

**BAB IX : BERISTERI LEBIH DARI SATU ORANG**

- Pasal 55 (1) : Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

---

<sup>51</sup>H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Akademika, 1992). h. 126-134.

- (2) : Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
  - (3) : Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.
- Pasal 56 (1) : Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) : Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
  - (3) : Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Pasal 57 : Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- Pasal 58 (1) : Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :
- a. Adanya persetujuan isteri,
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) : Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) : Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan lagi bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 : Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB XI : BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70 : Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i;

Pasal 71 : Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama

Bagian Kelima : Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari seorang

Pasal 82 (1) : Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) : Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Dalam kaitannya dengan poligami menurut yuridis konstitusional ini, sebagian orang mengatakan bahwa undang-undang perkawinan terlalu mempersulit pelaksanaan poligami atau berkehendak menekan sekecil mungkin atau bahkan mengikis habis, membatat sampai ke akar-akarnya pelaksanaan poligami secara formal. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar walaupun tidak boleh dikatakan sepenuhnya salah.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Lihat Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Cet. I; Yogyakarta: al-Kautsar, 1990), h. 157.

Memang undang-undang perkawinan menganut asas monogami, tetapi pelaksanaannya bukan merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Undang-undang masih mentolerir dan memberi kesempatan kepada laki-laki tertentu untuk berpoligami, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat-syarat tersebut diajukan agar laki-laki tidak seenaknya saja melaksanakan kawin cerai, tidak seenaknya melaksanakan poligami. Adalah benar bila dibandingkan dengan pelacuran dan perzinahan, maka poligami adalah alternatif bagi laki-laki yang berkehendak menyalurkan nafsunya kepada wanita lain di luar isteri pertamanya. Tetapi masalahnya menurut negara tidak hanya sampai di situ, karena masalah poligami dapat menyangkut banyak masalah lain.<sup>53</sup>

Seorang suami yang tidak mampu berpoligami lalu melakukannya, maka yang menjadi korban adalah isteri, baik isteri muda maupun isteri tua, serta anak-anak yang lahir dari mereka.

Apabila persyaratan-persyaratan yang ditentukan itu dianggap memberatkan, itu adalah suatu hal yang wajar, sebab poligami sendiri bukanlah perbuatan sembarangan, bukan sekedar gagah-gagahan, tetapi lebih dari itu menyangkut ketenteraman dalam keluarga. Oleh karena itu, tidak semua laki-laki mampu berpoligami dan tidak setiap laki-laki harus menuju ke sana.

Kesulitan persyaratan poligami dalam perundang-undangan hanya terletak pada pemberian ijin dari isteri pertama, sebab memang sulit atau

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

kemungkinan kecil ada laki-laki yang mau minta ijin kepada isterinya untuk kawin lagi dan kecil sekali kemungkinannya ada isteri yang bersedia memberikan ijin kepada suaminya untuk kawin lagi, kecuali ada pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Namun yang lebih langka, adalah isteri yang bersedia mencari isteri atau melamarkan gadis buat suaminya yang sekaligus menjadi madunya. Tentu saja hampir semua laki-laki mendambakan isteri seperti itu dan dianggap begitu anggun di mata suaminya, tetapi isteri yang demikian sangat langka., walaupun tidak boleh dikatakan tidak ada sama sekali, terutama untuk kalangan suku tertentu, seperti di Aceh, Makassar, Malaysia dan sebagainya.<sup>54</sup>

Terlepas dari semua itu, yang lebih menarik untuk dikaji adalah ijin kawin bagi pegawai negeri. Pegawai negeri terikat oleh peraturan yang dikeluarkan, yaitu khusus untuk pegawai negeri sipil dan yang dipersamakan, seperti pejabat pemerintahan desa, telah dikeluarkan PP No. 10/1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan maksud agar pegawai negeri sipil menjadi contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan dalam masyarakat, termasuk dalam membina kehidupan rumah tangga.

PP No. 10/1983 secara tidak langsung untuk memperketat dan mempersulit izin perceraian dan izin poligami, sebab selain yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975, juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam PP No. 10/1983.

Untuk selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut mengenai poligami adalah sebagai berikut.<sup>55</sup>

- Pasal 4 (1) : Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) : Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) : Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (4) : Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5) : Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
- Pasal 5 (1) : Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki.
- (2) : Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.
- Pasal 9 (1) : Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertim-

---

<sup>55</sup>Lihat H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III: Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), h. 382-386.

- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11 (1) : Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila :

- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
- b. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(2) : Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh pejabat apabila :

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
- b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 16 : Pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pada pasal 16 di atas dikemukakan bahwa apabila pegawai negeri melakukan perceraian atau poligami tanpa izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang, maka ia dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri tidak atas permintaan sendiri. Hal ini berarti bahwa seorang pegawai negeri laki-laki bila mau berpoligami, di samping minta ijin kepada isteri tuanya, juga harus

- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11 (1) : Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila :

- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
  - b. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - c. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (2) : Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh pejabat apabila :
- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
  - b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - d. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 16 : Pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pada pasal 16 di atas dikemukakan bahwa apabila pegawai negeri melakukan perceraian atau poligami tanpa izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang, maka ia dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri tidak atas permintaan sendiri. Hal ini berarti bahwa seorang pegawai negeri laki-laki bila mau berpoligami, di samping minta ijin kepada isteri tuanya, juga harus



mendapatkan ijin dari atasannya. Walaupun isteri tuanya sudah menyetujui atau memberi ijin tetapi pejabat atasannya keberatan memberikan ijin, maka pegawai negeri sipil tersebut tidak dapat melaksanakan poligaminya. Pengadilan baru memberi ijin kepadanya apabila isteri tua dan pejabat atasannya sudah memberikan ijin. Apabila pegawai negeri sipil tersebut melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, maka taruhannya adalah jabatan.

Apabila diperhatikan secara seksama PP No. 10/1983 ini, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini merupakan senjata pamungkas untuk mempersulit Pegawai Negeri Sipil yang hendak melaksanakan perceraian dan poligami. Tetapi, istilah sulit bukan berarti tertutup sama sekali, tetapi masih ada celah-celah meskipun harus memenuhi peraturan yang sangat ketat.

Sebagian orang, terutama kaum laki-laki baik terang-terangan maupun secara diam-diam (terutama pegawai negeri) menganggap bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia cukup sulit, kurang memberikan kebebasan kepada kaum laki-laki terutama pegawai negeri. Tetapi logika yang dipergunakan oleh negara sebaliknya, yaitu kebebasan yang bertanggungjawab dan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketatnya aturan mengenai ijin berpoligami bagi pegawai negeri sipil menurut logika yang dipergunakan oleh negara memang tepat yaitu dengan adanya peraturan yang ketat saja masih sering kebobolan, apalagi bila diberi kebebasan pasti akan dilanggar. Dengan adanya peraturan yang ketat saja, banyak pegawai

negeri yang secara diam-diam melaksanakan poligami, apalagi bila dibebaskan tentu akan lebih banyak lagi pegawai negeri yang melakukan poligami.<sup>56</sup>

Peraturan perundang-undangan lainnya adalah :

- PP No. 45/1990 tentang Perubahan atas PP no. 10/1983 :<sup>57</sup>

- Point 2 : Mengubah ketentuan pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 4 (1) : Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) : Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
- (3) : Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) : Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.
- Point 3 : Mengubah ketentuan ayat (2) pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) : Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.
- Point 6 : Ketentuan pasal 11 dihapuskan seluruhnya.
- Point 8 : Mengubah ketentuan pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 12 : Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan

---

<sup>56</sup>Lihat *ibid.*, h. 164-165.

<sup>57</sup>Lihat *ibid.*, h. 417-419.

oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

- SE. BAKN No. 48/1990 (Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990) :<sup>58</sup>

### III. Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.
3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
5. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing-masing.
6. Apabila dalam waktu yang ditentukan Pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk beristeri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
7. Apabila hal tersebut dalam angka 6 di atas ternyata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukum disiplin.

### IV. Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan menjadi Isteri kedua/ketiga/keempat

---

<sup>58</sup>Lihat *ibid.* h. 401-406.

1. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
2. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

#### VIII. Sanksi

1. Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :
  - c. Beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat;
  - f. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
  - g. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristeri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
  - h. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Dari beberapa peraturan-peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, PP No. 10/1983, PP No. 45/1990, SE. BAKN No. 48/1990, dan Inpres No. 1/1991.

pemerintah berusaha membatasi pelaksanaan poligami yang gegabah, demi nasib isteri dan anak-anaknya serta keluarga pada umumnya.

Terlepas dari peraturan perundang-undangan di atas, maka selanjutnya akan dipaparkan kritik terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Dra. Musdah Mulia, MA, APU mengatakan dalam bukunya *Pandangan Islam tentang Poligami* bahwa peraturan perundang-undangan mengenai poligami hanya mementingkan kepentingan suami dan sama sekali tidak memperhatikan kepentingan perempuan sebagai isteri.<sup>59</sup>

Untuk mendukung pendapatnya tersebut, Musdah Mulia mengemukakan bahwa dalam perundang-undangan tersebut seorang suami disyaratkan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya bila ia hendak berpoligami (pasal 55 ayat (2)), dan harus ada persetujuan dari isteri serta adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka (pasal 5 UU No./1974).<sup>60</sup>

Namun, pada pasal 59 dinyatakan : Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di per-

---

<sup>59</sup>Lihat Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 59-60.

<sup>60</sup>*Ibid.*

sidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>61</sup>

Menurutnya, pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi isteri. Sebab, manakala isteri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun diakhir pasal tersebut ada klausul yang memberikan kesempatan pada isteri untuk mengajukan banding. Dalam realitas, umumnya para isteri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami.<sup>62</sup>

Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat pula diketahui bahwa alasan dibolehkannya seorang suami untuk berpoligami ada 3, yaitu : 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan yang diberikan tersebut sama sekali tidak mewartakan tuntunan Allah swt. dalam QS. al-Nisā (4): 19 :

...وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.

Terjemahnya :

‘...Dan bergaullah dengan mereka (isteri) secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi

<sup>61</sup>Lihat H. Abdurrahman, *op. cit.*, h. 127.

<sup>62</sup>Lihat Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 60.



kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.’<sup>63</sup>

Dengan merujuk ayat di atas tampak dengan jelas bahwa semua alasan yang dikemukakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan isteri. Tidak pernah dipertimbangkan, misalnya andaikata suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami mendapat cacat atau penyakit, atau suami mandul, apakah Pengadilan Agama juga akan memberikan izin kepada isteri untuk menikah lagi? Ketentuan perundang-undangan terutama KHI ini jelas menunjukkan posisi ketidakberdayaan perempuan di hadapan laki-laki.<sup>64</sup>

Sehubungan dengan alasan yang dikemukakan tersebut, apabila dipikir secara jernih, mau tidak mau harus dikau bahwa kondisi isteri yang mandul atau berpenyakit bukanlah kondisi yang disengaja. Kondisi itu lebih merupakan takdir dari Tuhan, karena tidak ada isteri yang menginginkan dirinya mandul atau berpenyakit. Semua perempuan tentu menginginkan dirinya sehat, tetapi tidak semua keinginan manusia itu dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.<sup>65</sup>

Menghadapi kenyataan pahit yang demikian, apakah wajar kalau suami mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan, atau bahkan

---

<sup>63</sup>Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 119.

<sup>64</sup>Lihat Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 61.

<sup>65</sup>*Ibid.*

menyakiti hati isterinya dengan mencari wanita lain? Apakah suami tega mereguk kebahagiaan di balik penderitaan isterinya? Tidakkah suami membayangkan andaikata kondisi tersebut terjadi pada dirinya? Di sinilah agama berperan memberikan tuntunan agar suami memiliki *murū'ah* (rasa malu) dan tenggang rasa agar rela menerima seburuk apa pun kondisi isterinya. Sebab boleh jadi, di balik kondisi buruk yang tidak disukainya itu tersimpan sejumlah hikmah kebaikan bagi dirinya.<sup>66</sup>

Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan. Pembebasan tersebut terutama ditujukan, kepada tiga kelompok masyarakat yang sering disebut Alquran dengan istilah *al-mustad'afin* (orang-orang yang dilemahkan): para budak, anak yatim, dan kaum perempuan. Mereka disebut demikian karena hak-hak mereka seringkali diabaikan. Peraturan-peraturan yang ada pun kurang responsif terhadap kebutuhan hukum dan kepentingan perempuan. Kesemuanya itu disebabkan, antara lain, karena peraturan-peraturan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan kaum laki-laki.

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, h. 62.



## BAB IV

### POLIGAMI DALAM PROSPEKTIF DAN REALITAS SOSIAL

#### ***A. Prospektif Pelaksanaan Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia***

Berbicara mengenai prospek pelaksanaan poligami, tentu tidak terlepas dari ekses-ekses yang dihadapi dalam berpoligami. Adapun ekses-ekses poligami menurut Abdul Nāṣir Taufiq al-Attār<sup>1</sup> antara lain :

1. Wanita cemburu
2. Laki-laki tidak bijaksana
3. Anak-anak berkelahi
4. Kesulitan ekonomi

Sementara itu, ekses-ekses poligami menurut Muṣṭāfa al-Sibā'iy<sup>2</sup> adalah :

1. Permusuhan
2. Pertengkaran antara isteri-isteri yang dimadu
3. Suami tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya
4. Anak-anak terlantar

Ekses terbesar yang timbul dari poligami adalah cemburunya wanita, karena dalam poligami tentu saja menimbulkan persaan sakit hati

---

<sup>1</sup>Baca Abdul Nāṣir Taufiq al-Attār, *Ta'addud al-Zawjāt min al-Nawāḥiy al-Diniyah wa al-Ijtimā'iyah wa al-Qānūniyah*, diterjemahkan oleh Chadidjah Nasution dengan judul *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 48-62.

<sup>2</sup>Lihat Muṣṭāfa al-Sibā'iy. *op. cit.*, h. 126- 128.

pada isteri pertama dan menimbulkan harapan pada isteri baru, namun tidak berapa lama kemudian api cemburu akan menyala di dalam hati wanita, baik yang lama maupun yang baru.

Meskipun demikian, tidaklah pantas apabila cemburunya wanita tersebut dinilai sebagai sesuatu sifat yang buruk, karena perasaan cemburu dari seorang wanita terhadap suaminya merupakan cetusan yang jujur dari perasaan cintanya, dan juga merupakan pantulan yang sehat dari ukuran keakuannya dalam keinginan untuk memonopoli perasaan cintanya kepada suaminya.

Namun dalam kenyataan, sifat cemburu seorang isteri terhadap suaminya tidak hanya terjadi pada keluarga poligamis, tetapi juga terjadi pada keluarga yang monogamis. Sifat cemburu tersebut adalah sesuatu hal yang wajar selama tidak berlebih-lebihan. Sebab, ketika api cemburu tersebut sudah melewati batas, maka hal inilah yang ssering menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam keluarga, baik dalam keluarga monogamis, terlebih lagi dalam keluarga poligamis.

Ekses terpenting lainnya yang dapat muncul dari poligami adalah laki-laki atau suami yang tidak bijaksana terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Laki-laki adalah kepala keluarga dalam rumah tangganya. Dialah yang bertanggung jawab terhadap siapa yang berada di bawah pengayomannya. Tindak-tanduk seorang kepala rumah tangga terhadap isteri dan anak-anak yang menjadi tanggungannya sangat tergantung pada kemampuannya dalam mengayomi anggota keluarganya, sejauh mana

kebaikān yang menjadi tujuannya dan seberapa lama ia tegak di atas kebenaran dan melaksanakan keadilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa semua persoalan yang muncul dalam keluarga poligamis itu tidak terlepas dari latar belakang laki-laki dalam melakukan poligami. Selama tindakan untuk berpoligami itu dilandasi dengan niat yang mulia, maka persoalan-persoalan yang bakal muncul dapat ditekan sedemikian rupa, sehingga meskipun terjadi tindakan yang tidak bijaksana, tetapi tidak terlalu menonjol. Misalnya, laki-laki meninggalkan salah seorang dari isteri-isterinya. Namun pun demikian, tidak bijaksananya seorang laki-laki tidak pula terlepas dari sifat atau kepribadiannya.

Ekses poligami lainnya adalah dapat pula menimbulkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga, baik pertengkaran itu antara suami dengan isteri-isterinya, suami dengan anak-anaknya, isteri dengan para madunya, dan isteri dengan para ibu tirinya atau anak-anak dengan saudaranya sendiri.

Dalam kenyataan, perkelahian terkadang pula terjadi dalam keluarga yang monogamis, antara kakak beradik yang sekandung. Namun, perkelahian atau pertengkaran dalam keluarga yang monogamis tersebut dapat ditolerir sedemikian rupa, karena pihak-pihak yang terlibat dalam pertengkaran tersebut masih mempunyai hubungan darah sekandung. Dalam arti, bahwa apabila anak-anak tersebut diperingati atau dinasehati oleh ibu bapak kandungnya, kemungkinan masih dapat menerima saran dan nasehat, dikarenakan yang menasehatinya adalah ibu bapak

kandungnya sendiri. Tetapi, apabila nasehat itu berasal dari ibu tirinya, maka kemungkinan untuk melawan dapat saja terjadi, karena anak-anak tersebut merasa bahwa ibu tirinya itu bukanlah ibu yang melahirkan mereka.

Selanjutnya, eksekusi yang ditimbulkan oleh poligami adalah kesulitan ekonomi. Kemakmuran dalam rumah tangga erat hubungannya dengan kemakmuran dalam masyarakat secara menyeluruh. Menurut para anti poligami bahwa suasana ekonomi rakyat masa sekarang ini tidak membentangkan jalan bagi seorang laki-laki untuk berpoligami, karena poligami itu akan menimpakan beban yang teramat berat kepada laki-laki. Laki-laki harus membiayai keluarganya yang besar, isteri-isteri dan anak-anak yang jumlahnya banyak, sedang kebutuhan tiap-tiap person makin lama makin meningkat, dan penghasilan seseorang selamanya terbatas. Jadi, poligami menyebabkan keguncangan dalam kehidupan berumah tangga, dan dapat mempengaruhi penghasilan tiap-tiap person dalam masyarakat, maka, menurutnya, sebaiknya poligami dilarang.

Pandangan tersebut ditentang oleh para pendukung poligami dengan mengatakan bahwa urusan poligami itu bukanlah urusan ekonomi, tetapi urusan masyarakat dan agama. Menurut mereka, standar masyarakat dalam kesulitan ekonomi bagi keluarga poligamis malah lebih enteng dari kesulitan masalah harta bagi keluarga monogamis. Jadi, jelas bahwa tingkatan kemakmuran itu adalah suatu hal yang tidak dapat dijamin dalam lingkungan keluarga monogamis.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Lihat Abdul Nāṣir Taufiq al-Aṭṭar, *op. cit.*, h. 59.

Setelah menganalisa pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa masalah ekonomi relatif adanya di kalangan masyarakat, dan tentulah keinginan untuk hidup makmur itu tidaklah menyebabkan pemerintah harus melarang poligami. Poligami memang mempunyai pengaruh tersendiri terhadap penghasilan keluarga.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prospek pelaksanaan poligami dalam hukum islam sangat baik, karena sebagian besar ulama telah menyepakati kebolehan berpoligami, walaupun kebolehan berpoligami itu sendiri dibatasi dengan beberapa syarat yang mengikat. Namun pun demikian, kita tidak dapat menutup mata bahwa akhir-akhir ini, poligami –walaupun telah disepakati kebolehannya- adalah sebuah masalah yang paling sering menimbulkan perselisihan di antara sesama keluarga. Ekses dari semua itu adalah poligami dipandang sebagai momok yang sangat menakutkan di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi masyarakat tersebut, maka dalam hukum perundang-undangan di Indonesia, penulis melihat bahwa poligami semakin ditekan agar tidak terjadi. Hal ini dapat dilihat pada empat undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur poligami, yaitu UU No. 1/1974, UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, PP No. 10/1983, PP. No. 45/1990, SE. BAKN No. 48/1990, Inpres No. 1/1991, SEMA No. 5/1984. Dengan disebutkannya beberapa syarat, maka poligami semakin sulit dilaksanakan, dikarenakan syarat itu sendiri sangat bertele-tele, dan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk dapat sampai pada keputusan akhir, yakni kebolehan untuk berpoligami. Dampak dari semua

itu adalah terkadang banyak orang yang tidak mau menempuh prosedur hukum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka terjadilah nikah di bawah tangan.

### ***B. Poligami dalam Hukum Islam dan Realitas Sosial Masyarakat***

Islam telah meletakkan poligami dalam proporsinya. Islam mengakui kemungkinan terjadinya poligami, atau diisyaratkan keadaan tertentu untuk berlakunya ketentuan itu. Meskipun demikian, pada hakekatnya poligami merupakan penghinaan terhadap perempuan. Sebab, secara umum berdasarkan fitrahnya tidak ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu. Poligami dianggap sebagai momok bagi perempuan, poligami merupakan penyakit yang menjijikkan, poligami merupakan makanan madu sekaligus racun bagi perempuan. Oleh karenanya, dimadu berarti diracun. Akan tetapi, betapa pun pedihnya dimadu, adalah sebuah perasaan yang lazim dalam kehidupan. Perasaan seperti itu tidak lebih parah daripada tidak punya pekerjaan, hidup hina dan sengsara, dicemoohkan orang, malu karena perbuatan yang tidak senonoh dan lain sebagainya.

Qāsim Amīn menggambarkan sosok suami yang memiliki isteri banyak tidak ubahnya sekumpulan ayam betina. Yang demikian itu alamiah di dunia hewan, tetapi tidak alamiah di dunia manusia. Berbeda dengan manusia, binatang tidak mempunyai emosi, sehingga poligami di dunia binatang tidak menimbulkan problem psikologis, seperti yang dialami manusia. Dalam masyarakat yang semakin beradab, poligami

semakin jarang dijumpai. Konklusinya, semakin tinggi tingkat keberadaban manusia, semakin berkurang jumlah poligami.<sup>4</sup>

Secara jujur harus diakui bahwa semua isteri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Poligami adalah hal yang tidak disenangi kaum wanita. Setidaknya ada dua faktor mengapa wanita mempunyai sifat cemburu terhadap suaminya yang berpoligami ;

*Pertama*, didorong oleh rasa cinta setianya yang dalam kepada suamiya.

Umumnya isteri mempercayai dan mencintai suaminya sepenuh hati, sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang terhadap laki-laki lain. Isteri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, isteri tidak dapat menerima suaminya membagi cinta dengan perempuan lain, bahkan setelah mati pun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi.

Sifat cemburu bagi wanita merupakan cerminan sifat kecintaannya kepada suaminya. Bila sikap ini mendadak berubah, maka pulihnya sulit sekali. Seorang isteri yang mencintai suaminya setengah mati, kemudian disakiti oleh suaminya, maka kecintaannya menjadi pudar dan tumbuh sikap benci dan beku membatu serta acuh tak acuh kepada suami. Oleh karenanya, apabila hadir orang ketiga selain dia dan suaminya, maka dia akan merasa sakit hati.

Faktor *kedua*, isteri merasa diri inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya.

---

<sup>4</sup>Lihat Qāsim Amīn, *Tahrīr al-Mar'ah* (Tunis: dār al-Ma'ārif, 1990), h. 156-157.

Perasaan inferior itu semakin lama semakin meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga.<sup>5</sup>

Bukanlah hal yang mustahil memang apabila ada perempuan yang rela dan bersedia menerima poligami. Namun kerelaan atau kesetiaan dari satu atau sejumlah perempuan tidak boleh dijadikan acuan untuk menggeneralisasi, apalagi untuk memaksakan seluruh perempuan dapat menerima hal yang sama. Kerelaan yang jarang dan langka terjadi itu muncul apabila perempuan memandang atau menempatkan dirinya sebagai harta atau obyek yang dimiliki suaminya, bukan melihat dirinya sebagai subyek atau individu yang merdeka yang memiliki seperangkat hak. Dengan demikian, penerimaan poligami oleh perempuan bergantung pada seperti apa dia memandang dirinya.<sup>6</sup>

Problem psikologis lainnya adalah bentuk konflik internal dalam keluarga, baik di antara sesama isteri, antara isteri dan anak tiri atau di antara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara isteri. Hal itu terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan isteri muda ketimbang isteri lainnya. Bahkan tidak jarang setelah menikah suami menelantarkan isteri dan anak-anaknya.

Bentuk implikasi lain dari poligami adalah kekerasan terhadap perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perlakuan seperti ini seringkali

---

<sup>5</sup>Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), h. 51-52.

<sup>6</sup>*Ibid.*



terjadi dalam masyarakat. Definisi kekerasan terhadap perempuan menurut pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan justru lebih banyak terjadi dalam rumah tangga, dan pelakunya adalah suaminya sendiri. Kekerasan terhadap isteri biasanya sulit dan jarang diungkapkan karena dianggap sebagai masalah pribadi. Selain itu, isteri juga selalu diajarkan untuk selalu merahasiakan persoalan keluarganya (persoalan dengan suaminya) kepada orang lain. Keyakinan ini membuat isteri tetap diam, meskipun suaminya sudah memperlakukannya secara keras, seperti menampar, menendang, dan memukulinya dengan benda-benda tajam.

Realitasnya, pertengkaran antara suami dengan isteri pertamanya sudah tidak asing lagi di mata masyarakat. Tuntutan isteri pertama terhadap nafkah lahir dan batin; ditampik secara kasar dan tidak berperikemanusiaan. Laki-laki dengan sifat garangnya seenaknya saja mengelak dari sebuah pertanggungjawaban moral yang dibebankan kepadanya sebagai suami yang poligamis. Laki-laki lupa, bahwa bagi perempuan diceraikan –walaupun itu pekerjaan halal tapi dimurkai Allah- lebih mulia adanya ketimbang ditelantarkan.

Bentuk kekerasan seksual terhadap isteri seperti suami tidak memperhatikan kebutuhan dan kepuasan seksual isterinya. Hal itu terjadi karena dalam poligami suami biasanya hanya tertarik melakukan hubungan seksual dengan isteri mudanya. Sementara isteri lain diabaikan dan tidak dipenuhi kebutuhannya.

Poligami juga seringkali membuat suami memaksakan kehendak kepada isteri. Dari mulut suami tidak jarang terdengar ancaman terhadap isteri : "Kalau kamu tidak setuju saya kawin lagi, pulang saja ke rumah orang tuamu, saya tidak perlu kamu lagi." Sebagian isteri, karena malu dan berat kepada orang tua dan kepada keluarga memilih tinggal bersama suami, biarpun dipukuli dan disiksa seperti binatang.

Perempuan adalah makhluk lemah lembut, penuh kasih dan sayang. Perempuan punya rasa malu yang sangat besar. Oleh karena itu, problema yang dihadapi dalam rumah tangganya, sekalipun dia diperlakukan tidak adil oleh suaminya, dia lebih banyak memilih diam ketimbang harus berkoar-koar menuntut keadilan. Meskipun masih ada perempuan lain yang berani meneriakkan ketidakadilan dalam rumah tangganya, namun peristiwa seperti itu sangat sedikit ketimbang perempuan yang memilih diam. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemihakan kepada perempuan. Mengajukan kekerasan dalam rumah tangganya ke pengadilan merupakan perbuatan yang serba salah. Di satu sisi, dia menuntut keadilan tetapi keputusan yang banyak diberikan pada beberapa kasus adalah ditimpakannya kesalahan itu pada perempuan. Sementara di sisi lain, hal itu berarti memproklamirkan problem rumah

tangganya kepada khalayak, yang berarti beban rasa malu terus di tanggung di atas pundaknya.

Kenyataan umum yang sering pula terjadi adalah sikap suami yang mulai melirik perempuan lain lebih sensitif dan emosional terhadap isterinya. Dia menjadi ringan tangan dan mudah menampar dan memukul isteri. Bahkan, tidak sedikit suami membawa pulang isteri muda ke rumahnya dan tentu saja itu merupakan pelecehan yang luar biasa terhadap perempuan.

Demikian pula, pada umumnya laki-laki yang merasa puas dan berbahagia dengan poligami adalah laki-laki yang dalam prakteknya mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditetapkan agama. Mereka mengambil perhatian dengan memenuhi hak-hak seorang isteri, tetapi mengabaikan hak isteri lain.

Dalam perundang-undangan hukum di Indonesia, suami yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap isteri dapat dihukum berdasarkan pasal 356 KUHP (Penganiayaan dengan Pemberatan Pidana). Penganiayaan ini dapat pula dijadikan alasan bagi isteri untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 PP No. 9/1975 dan dapat menyebabkan jatuhnya talak menurut sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung. Hanya saja, dalam prakteknya perlindungan hukum yang ada ini tidak efektif karena berbagai alasan, di antaranya adalah kurang sensitifnya para penegak hukum terhadap kepentingan dan hak-hak perempuan. Alasan lain adalah sikap

masyarakat yang cenderung menyalahkan kaum perempuan sehingga banyak isteri yang malu memperkarakan persoalannya ke pengadilan.

Isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga memerlukan penyuluhan dan perlindungan. Mereka sebaiknya menghubungi lembaga-lembaga pelayanan yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan, seperti Lembaga Bantuan Hukum APIK, Rumah Ibu, Lembaga Kalyanamitra, Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan Fatayat NU, Komnas HAM Perempuan, dan Rifka Annisa di Yogyakarta. Namun sayang lembaga semacam ini masih sangat sedikit jumlahnya.<sup>7</sup>

Problem sosial lainnya yang sering muncul di masyarakat sebagai implikasi dari poligami adalah nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor pencatat nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang bukan Islam, walaupun menurut hukum agama, perkawinan itu dianggap sah. Dengan kata lain, perkawinan itu secara agama sah, tetapi secara administratif tidak tercatat. Para suami yang berpoligami biasanya enggan mencatatkan perkawinannya karena mereka malu dan segan kalau perkawinannya diketahui banyak orang. Lagi pula, mereka tidak ingin direpotkan dengan tetek bengek urusan administratif

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

negara. Mereka juga tidak perlu buku nikah karena mereka toh telah memilikinya melalui perkawinan dengan isterinya yang terdahulu.<sup>8</sup>

Persoalannya adalah para isteri yang dinikahi dengan cara tersebut dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-haknya atas nafkah dan warisan, terutama jika suaminya meninggal, karena perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2 KHI.

Berdasarkan kenyataan di atas, muncul kasus-kasus yang membuat pihak isteri terlantar setelah diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya karena mereka tidak berhak mendapatkan warisan atau nafkah dari suami lantaran dia tidak memiliki buku catatan nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa adanya praduga yang tidak benar terhadap poligami itu disebabkan oleh perilaku-prilaku dari laki-laki yang berpoligami itu sendiri. Akibatnya, meskipun poligami itu dibolehkan, tetapi masyarakat mulai tabu dengan persoalan poligami. Poligami sudah dianggap sebagai momok bagi kehidupan mereka. Hanya laki-laki yang betul-betul tidak peduli dengan kondisi masyarakatlah yang akan melakukan poligami, dikarenakan sindiran dan cibiran masyarakat terhadap pelaku-pelaku poligami. Ironisnya, cibiran itu pun terkadang pula ditujukan kepada para wanita yang rela dimadu. Maka benarliah apa yang diungkapkan oleh Qāsim Amīn bahwa dalam masyarakat yang semakin beradab, poligami akan semakin jarang dijumpai.

---

<sup>8</sup>*Ibid.* h. 53.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Salah satu bentuk perkawinan yang sering mengundang kontroversi adalah poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Poligami itu sendiri telah ada dan menjadi sebuah praktek gagah-gagahan di kalangan bangsa-bangsa di dunia.

Praktek poligami tersebut sering disalah tafsirkan oleh banyak orang. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, sebab berabad-abad sebelum islam datang, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Padahal, sebelum Islam datang, praktek poligami sudah berlaku pada berbagai bangsa. Data yang ada menunjukkan bahwa praktek poligami telah berlangsung di negeri-negeri yang tidak beragama Islam hingga sekarang, seperti penduduk asli Asia Afrika, Hindu, india, Cina dan Jepang.

Poligami dalam sejarahnya dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu praktek poligami pada masa sebelum dan setelah islam datang. Praktek poligami sebelum Islam dapat dilihat pada 3 bentuk, yaitu: 1) Seorang isteri memiliki banyak suami (*poliandri*), 2) Gabungan poligami dengan poliandri, dan 3) Seorang suami memiliki banyak isteri (*poligini/poligami*). Poligami pada saat itu dilaksanakan tanpa ada ikatan dan batasan. Mereka berhak mengawini perempuan-perempuan mana saja yang mereka kehendaki, berapa pun banyaknya.

Setelah Islam datang dengan ajarannya yang paripurna, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami (QS. al-Nisā (4): 3) diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Islam lalu memberikan aturan mengenai pelaksanaan poligami, yaitu: 1) Membatasi jumlah bilangan isteri hanya sampai empat, 2) Menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berbuat adil. Dengan demikian, tampak bahwa praktek poligami pada masa datangnya Islam sangat berbeda dengan praktek poligami yang ada sebelumnya.

2. Poligami adalah sebuah aturan alternatif yang ditawarkan oleh Islam dalam mengantisipasi keadaan tertentu yang dihadapi manusia. Poligami yang ditetapkan oleh Islam bertujuan untuk menanggulangi dan memperbaiki keadaan manusia. Oleh karenanya, sangatlah tidak tepat apa yang dikatakan oleh orang-orang Barat bahwa poligami adalah sebuah

cacat dan kejanggalan dalam hukum Islam. Padahal poligami pada hakikatnya merupakan institusi yang patut dibanggakan dalam Islam.

Beberapa ulama –baik ulama klasik maupun kontemporer– berpendapat bahwa poligami itu mempunyai beberapa hukum, yaitu : 1) Poligami dilarang (haram) secara mutlak, 2) Poligami dilarang dengan syarat tidak karena darurat, 3) Poligami dibenarkan (mubah) tanpa batas, 4) Poligami dibenarkan sampai 18 orang, 5) Poligami dibenarkan sampai 9 orang, dan 6) Poligami dibenarkan sampai 4 orang.

Dari keenam pendapat tersebut dipahami bahwa menurut hukum Islam, poligami adalah sesuatu perbuatan yang diperbolehkan (*mubāh*), dengan ketentuan dapat berlaku adil dan jumlah isteri maksimal empat. Adapun perbedaan dalam pembatasan jumlah isteri tersebut merupakan perbedaan yang lumrah adanya, dikarenakan perbedaan dalam memahami makna ayat yang termaktub dalam QS. al-Nisā (4): 3 dan 129 tersebut.

Sementara dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia mengenai poligami dapat dilihat pada UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974, PP No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, PP. No. 45/1990 tentang Perubahan atas PP No. 10/1983, SE. BAKN No. 48/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990 tentang Perubahan atas PP No. 10/1983, SEMA No. 5/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan No. 10/1983, Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).



Poligami pada keempat perundang-undangan tersebut diberi ruang gerak yang sangat sempit. Dengan beberapa aturan yang mengikat, poligami ditekan sedemikian rupa, terlebih bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut dapat dilihat pada keharusan seorang suami untuk meminta izin pada isteri pertamanya, meminta izin pada atasan, dan lain sebagainya.

3. Dalam realita dapat dilihat bahwa perkawinan poligami banyak menimbulkan problem dalam masyarakat. Di antaranya: pertengkaran di antara anak-anak dan ibu tirinya, antara suami dengan para isterinya, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, tidaklah dapat disimpulkan bahwa semua perkawinan poligamis banyak mengundang keresahan dalam masyarakat, sebab di samping dampak negatif yang ditimbulkan juga terdapat dampak positif. Seperti, dapat menyelamatkan wanita yang jumlahnya lebih banyak untuk tidak terjun dalam lembah maksiat dengan menjadikannya sebagai isteri, suami yang dapat berlaku adil dan bijaksana dapat menghidupi para isteri dan anak-anaknya, sehingga kedamaian dalam rumah tangga dapat tercipta, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, baik buruknya dampak dari poligami itu sangat tergantung pada laki-laki yang ingin berpoligami.

Dari fakta dan realita yang ada, poligami di mata masyarakat – meskipun boleh- seakan menjadi momok yang menakutkan, terlebih bagi perempuan itu sendiri. Adanya anggapan bahwa hanya laki-laki yang mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnyalah yang merasa puas dan bahagia dengan poligami. Asumsi ini muncul dengan adanya

beberapa tindak kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya, dikarenakan perhatiannya telah terbagi kepada isteri mudanya, atau bahkan menelantarkan mereka dalam kesengsaraan.

### ***B. Implikasi***

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga, segala persoalan kehidupan manusia timbul. Salah satu ajaran yang dibawa oleh Islam sebagai salah satu problem dalam rumah tangga adalah mengenai aturan poligami, sebagai antisipatif atau pintu darurat dari sebuah kondisi yang mungkin terjadi. Poligami, sekalipun banyak perempuan tidak setuju, merupakan sebuah institusi yang dibanggakan dalam Islam, karena telah memberikan sebuah jalan keluar dari kondisi yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia. Ajaran poligami ini merupakan salah satu bukti keluasan dan keluwesan hukum Islam.

Terlepas dari hal tersebut, realitas dalam masyarakat berbicara bahwa poligami adalah sebuah momok yang menakutkan, sebuah jalan yang kurang mendapat restu masyarakat. Hal ini disebabkan karena laki-laki yang berpoligami itu sendiri cenderung pada pelaksanaan poligami tanpa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Poligami dilakukan tanpa diawali dengan niat yang suci dan mulia untuk menyelamatkan kaum perempuan, tetapi lebih pada pelampiasan libido seksual. Di antaranya, melaksanakan poligami secara sembunyi-sembunyi, tidak

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Akademika, 1992.

Abubakar, H. Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: al-Hikmah, t.th.

Abū Dāud, *Sunan Abi Dāud*, Jilid I. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Aisyah bint al-Syāti. *Nisā' al-Nabiy Alaihi al-Ṣalāt wa al-Salām*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf dengan judul *Isteri-isteri Nabi*. Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Akkad, Abbas Mahmud. *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*, dialihbahasa oleh Chadidjah Nasution dengan judul *Wanita dalam Al-Qur'an*. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ali, Sayyid Ameer. *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideals of Islam with a Life of the Prophet*. Delhi: Jayyad Press, 1922.

Amin, Qāsim. *Tahrīr al-Mar'ah*. Tunis: Dār al-Ma'ārif, 1990.

Aṭṭar, Abdul Nāsir Taufiq. *Ta'addud al-Zaujāt min al-Nawāhiy al-Diniyah wa al-Ijtimā'iyah wa al-Qānūniyah*, dialihbahasakan oleh Chadidjah Nasution dengan judul *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Audah, A. Qadir. *Al-Islām Bayna Jahl Abnāihi wa'jazi Ulamā*, alih bahasa oleh Mu'ammal Humaidiy dengan Judul *Islam di antara Kebodohan dan Kelemahan Ulama*. Jakarta: Media Dakwah, 1997.

Aulawi, H. Arso Sosroatmodjo dan H. A. Wasit. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Dasuqy, Ibrāhim. "Sekilas tentang Riwayat Pengarang" dalam al-Zamakhsyariy, *al-Kasysyāf*, Jilid IV. Teheran: Intisyarat Afataba, t.th.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putera, 1998.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Kathoda, 1990.

- Doi, A. Rahman I. *Syari'ah The Islamic Law* diterjemahkan oleh Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman dengan judul *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Engineer, Ali Ashgar. *The Rights of Women in Islam*, dialihbahasakan oleh Farid, Wajidi dan Cici Farkha Assegaf dengan judul *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.
- Fa'iz, Ahmad. *Dustūr al-Ushrah fī Zilāl al-Qur'ān*, diterjemahkan oleh Yunan Askaruzzaman, dkk., dengan judul *Cita Keluarga Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 1992.
- Faridl, KH. Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Fauzil Adhim, Mohammad. *Kado Pernikahan untuk Isteriku*. Cet. VI; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Gibb, H.A.R. dan J. H. Kraemers, *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden: E. J. Brill, 1974.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Cet. XVI; Bogor: Pusaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Haikal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw.: Poligami dalam Islam vs. Monogami Barat*, alihbahasa Ilyas Ismail al-Sendany. Cet. I; Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Humaidy, Mu'ammal. *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*. t.tp.: t.p., 1980.
- Ibn al-Qayyim, *Tafsīr ibn al-Qayyim*. Beirut: Dār al-Fikr, 1408/1988.
- Ibn Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II. Indonesia: Maktabah Dahlan, t. th.
- ibn Qudāmah, Muhammad. *Al-Mugni*, Jilid VII. Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Ibnu al-Asīr. *Jāmi' al-Uṣūl*, Juz I. Beirut: t. p., t. th.
- Imārah, Muhammad. *Al-A'mal al-Kamilah*, Juz II. t.t.: t.p., 1972.
- , *Al-Imam Muhammad Abduh: Mujaddid al-Islam*. t.tp.: t.p., 1981.
- al-Jahrani, Musfir. *Nazarāt fī Ta'addud al-Zaujāt* diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dengan Judul *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 1996.

- al-Jurjāwiy, Ali Ahmad. *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Kartasapoetra, Rien G. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- al-Khauiliy, Bahay. *al-Islām wa al-Qadāyā al-Mar'ah al-Muā'sirah*, diterjemahkan oleh Rosihin A. Gani dengan judul *Islam dan Persoalan Wanita Modern*. Cet. I; Solo: CV. Ramadhani, 1988.
- Khoiroh, M. Ahnan dan Ummu. *Poligami di Mata Islam*. Cet. I; Surabaya: Putra Pelajar, 2001.
- al-Khuliy, Amin. *Kasysyāf al-Zamakhshariy*. Mesir: Maktabah al-Usrah, t.th.
- Kisyik, Abdul Hāmid. *Binā' al-Usrah al-Muslimah: Mausū'ah al-Zawāj al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Ida Nursida dengan judul *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Cet. I; Bandung: al-Bayan, 1995.
- Labib MZ. *Pembelaan Umat Muhammad*. Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Madjid, Nurcholish. *Masyarakat Religius*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Mahmūd, Muni' Abdul Halim. *Manāhij al-Mufasssirūn*. Beirut: Dār al-Kutub, 1978.
- al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, Juz IV. Mesir: Muṣṭāfa al-Bāby al-Halabiy, 1382/1963.
- Muhammad. Maulana Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang poligami*. Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdEMIA, 1996.
- al-Qurtubi, *Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabiyah, 1387/1967.

Rahman, Fazlur. "A Survey of Modernization of Muslim Family Law", *International Journal of Middle East Studies* II. 1980.

Ridā, Muhammad Rasyīd. *Al-Manār*, Juz IV. t.t.: t.p., 1374.

al-Sābūni, Muhammad Ali. *al-Zawāj al-Islāmi al-Mubakkir: Sa'ādah wa Ḥaṣānah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nurdin dengan judul *Kawinlah Selagi Muda: Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*. Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2000.

-----, *Rawā'i'u al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Juz I. Mekkah: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1431/1972.

Sadily, Hassan. *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid V. Jakarta: Ikhtiar Baru, 1994.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Sayyid Qutub, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz IV. t.tp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1961.

Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, alihbahasa Muhammad Thalib, Jilid IV. Cet. XV; Bandung: PT. al-Ma'arif, t. th.

ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Shihab, M. Quraissy. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung, Mizan, 1994.

-----, *Membumikan Al-Qur'an*. Cet. VI; Bandung: Mizan, 1994.

Soemiyati, Ny. *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Suprpto, Bibit. *Liku-liku Poligami*. Cet. I; Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.

al-Sibā'iy, Muṣṭāfa. *al-Mar'ah Bayna al-Fiqh wa al-Qānūn*. t.tp.: al-Maktabah al-Arabiyah al-Bābi al-Halabiy, t.th.

-----, *al-Zawāj al-Islāmi al-Mubakkir: Sa'ādah wa Ḥaṣānah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nurdin dengan judul *Kawinlah Selagi Muda: Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*. Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2000.

al-Syarbāsi, Ahmad. *Yas'alūnaka fī al-Dīn wa al-Hayah*, diterjemahkan oleh Ali Yahya dengan judul *Yas'alunaka: Tanya Jawab lengkap tentang Agama dan Kehidupan*. Cet. I; Jakarta: Lentera, 2001.

Syari'ati, Ali. *Women in the Eyes and Heart of Muhammad*, diterjemahkan oleh Sofyan Abu Bakar dengan judul *Wanita di Mata dan Hati Rasul Allah*. Jakarta: Risalah Masa, 1992.

al-Syawkāniy, *Fath al-Qadīr: Bayna Fann al-Riwāyat wa al-Dirāyat min 'Ilm al-Tafsīr*, Jilid I. Beirut: Dār al-Fikr, 1393/1973.

al-Ṭabari, Ibnu Jarīr. *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1398/1978.

Thalib, M. *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*. Cet. I; Surabaya: al-Ikhlās, 1996.

al-Turmuzīy. *Sunan al-Turmuziy*, Juz II. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

Umar, Nasaruddin. *Islam dan Masalah Poligami: Pemahaman Ali Syari'ati*, dalam *Melawan Hegemoni Barat: Ali Syari'ati Dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Lentara, 1999.

Wāfi, Ali Abdul Wāhid. *Qīṣah al-Zawāj al-'Azūbah fī al-'Ilm*. al-Qāhirah: t.t., t.th.

Yanggo, H. Chuzaimah T. dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. II; Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1899.

al-Zamakhshariy, *al-Kasysyāf 'an Haqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta'wīl*. Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabiy, 1966.

Zuhdi, H. Masyfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992.

**DEPARTEMEN AGAMA R.I.  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ALAUDDIN MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864928-864931 Makassar

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN**

Nomor: 40 Tahun 2002

*tentang*

**PENELITI/KETUA PENELITI, JUDUL PENELITIAN DAN KONSULTAN  
PENELITI  
BIAYA DIKS IAIN ALAUDDIN TAHUN 2002**

**REKTOR IAIN ALAUDDIN**

*Setelah*

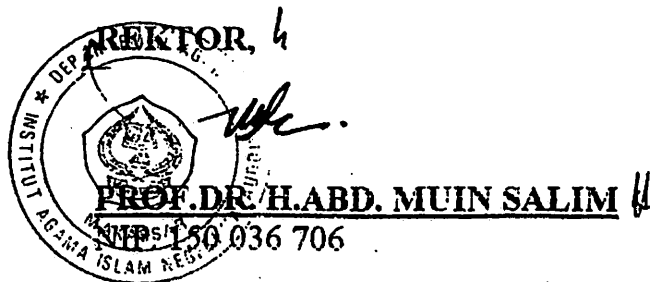
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam tahun anggaran 2002, dosen IAIN Alauddin Makassar akan melaksanakan penelitian.
  2. Bahwa untuk melaksanakan penelitian tersebut dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
  3. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan penelitian.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 232 tahun 1991 dan No.289 tentang wewenang menandatangani Surat Keputusan.
  4. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 389 tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Alauddin.
  5. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 403 tentang Statuta IAIN Alauddin
  6. Surat Dirjen Binbaga Islam Departememn Agama R.I. Nomor E/TI.00/A7/1878 A/1998 tanggal 29 Mei tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Penelitian
- Meningat pula :** Hasil pemeriksaan Tim Penyeleksi Proposal penelitian IAIN Alauddin tanggal 18 April 2002



**MEMUTUSKAN.**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENELITI/KETUA PENELITI, JUDUL PENELITIAN DAN KONSULTAN PENELITI BIAYA DIKS IAIN ALAUDDIN TAHUN 2002
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya di dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai peneliti/ketua peneliti dan konsultan.
- Kedua : Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) IAIN Alauddin tahun anggaran 2002
- Ketiga : Waktu pelaksanaan penelitian selama 7 (tujuh) bulan mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 2 Desember 2002.
- Keempat : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sesuai tanggal penetapannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 25 April 2002



**Tembusan:**

Disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Departemen Agama R.I. di Jakarta.
2. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. di Jakarta.
3. Ditbinperta Islam Departemen Agama R.I. di Jakarta
4. Kepala KPKN II Makassar.
5. Parta Dekan dalam lingkungan IAIN Alauddin.
6. Bendaharawan DIKS IAIN Alauddin Makassar.
7. Kepala Pusat Penelitian Alauddin Makassar

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN  
NOMOR: 40 TAHUN 2002**

tentang

**PENELITI/KETUA PENELITI, JUDUL PENELITIAN DAN PEMBIMBING  
PENELITIAN BIAYA DIKS IAIN ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2002**

<b>N0</b>	<b>PENELITI/KETUA PENELITI</b>	<b>JUDUL</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JENIS PEN.</b>	<b>PEMBIMBING</b>
1	Dra. Soraya Rasyid, M.Pd. Nip. 150 275 557 / III/b	Tuntutan PERMESTA Tentang Otonomi Daerah Sulawesi (1957-1961)	Adab	Mandiri	Prof.Dr.H.M. Radhi Al-Hafid, MA
2	Andi Miswar, S.Ag. M.Pd. Nip. 150 291 143 / III/a	Karakteristik Sigat Al-Nahwu dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum	Adab	Mandiri	Prof.Dr. H.A. Muin Salim
3	Dra. Marwati, M.Ag. Nip. 150 254 613 / III/b	Tobat dalam Al-Qur'an	Adab	Mandiri	Prof. Dr. H. Mappa-ngarro
4	Drs. Mardan, M. Ag Nip. 150 1 239 144 / IV/a	Lingkungan Hidup dalam Perspektif al-Qur'an	Adab	Mandiri	
5	Dra. Hj. Andi Aty Ulleng, M.Pd Nip. 150 043 520 / III/d	Persepsi Siswa Pesantren Babul Khaer Bulukumba Terhadap Eksistensi IAIN Alauddin Makassar	Dakwah	Mandiri	
⑥	Muh. Suhufi Abdullah, M. Ag. Nip. 150 298 940 / III/a	Peranan Alumni IAIN Dalam Pembangunan Masyarakat (Studi Terhadap Potensi Alumni IAIN Alauddin Makassar)	Dakwah	Mandiri	Prof.Dr.Hj.Andi Rasdiyanah
7	Dra. Murniati Sirajuddin, M.Pd. Nip. 150 218 493 / III/c	Beberapa Problem Bagi Upaya Peningkatan Mutu Alumni IAIN Alauddin Makassar	Dakwah	Mandiri	
8	Dra. A. Syahraeni, M. Ag Nip. 150 246 281 / III/c	Studi Terhadap Persepsi Siswa SMU Dan Agama Di- Kab. Takalar Terhadap Perguruan Tinggi IAIN Alauddin Makassar	Dakwah	Mandiri	
9	Drs. Hadi Dg Mapuna, M. Ag dkk Nip. 150 266 298 / III/c	Persepsi Siswa SLTA Umum Dan Agama Kota Makassar Terhadap IAIN Alauddin dan Pengaruhnya Terhadap Minat Melanjutkan Studi Ke IAIN Alauddin Makassar.	Syariah	Mandiri	

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN  
NOMOR: 40 TAHUN 2002**

**tentang**

**PENELITI/KETUA PENELITI, JUDUL PENELITIAN DAN PEMBIMBING  
PENELITIAN BLAYA DIKS IAIN ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2002**

<b>NO</b>	<b>PENELITI/KETUA PENELITI</b>	<b>JUDUL</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JENIS PEN.</b>	<b>PEMBIMBING</b>
1	Dra. Soraya Rasyid, M.Pd. Nip. 150 275 557 / III/b	Tuntutan PERMESTA Tentang Otonomi Daerah Sulawesi (1957-1961)	Adab	Mandiri	Prof.Dr.H.M. Radhi Al-Hafid, MA
2	Andi Miswar, S.Ag. M.Pd. Nip. 150 291 143 / III/a	Karakteristik Sigat Al-Nahwu dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum	Adab	Mandiri	Prof.Dr. H.A. Muin Salim
3	Dra. Marwati, M.Ag. Nip. 150 254 613/III/b	Tobat dalam Al-Qur'an	Adab	Mandiri	Prof. Dr. H. Mappa-nganro
4	Drs. Mardan, M.Ag Nip. 150 1 239 144/IV/a	Lingkungan Hidup dalam Perspektif al-Qur'an	Adab	Mandiri	
5	Dra. Hj. Andi Aty Ulleng, M.Pd Nip. 150 043 520 / III/d	Persepsi Siswa Pesantren Babul Khaer Bulukumba Terhadap Eksistensi IAIN Alauddin Makassar	Dakwah	Mandiri	
6	Muh. Suhufi Abdullah, M.Ag. Nip. 150 298 940 / III/a	Peranan Alumni IAIN Dalam Pembangunan Masyarakat (Studi Terhadap Potensi Alumni IAIN Aluiddin Makassar)	Dakwah	Mandiri	Prof.Dr.Hj.Andi Rasdiyanah
7	Dra. Murniati Sirajuddin, M.Pd. Nip. 150 218 493 / III/c	Beberapa Problem Bagi Upaya Peningkatan Mutu Alumni IAIN Alauddin Makassar	Dakwah	Mandiri	
8	Dra. A. Syahraeni, M.Ag Nip. 150 246 281 / III/c	Studi Terhadap Persepsi Siswa SMU Dan Agama Di- Kab.Takalar Terhadap Perguruan Tinggi IAIN Alauddin Makassar	Dakwah	Mandiri	
9	Drs. Hadi Dg Mapuna, M.Ag dkk Nip. 150 266 298 / III/c	Persepsi Siswa SLTA Umum Dan Agama Kota Makassar Terhadap IAIN Alauddin dan Pengaruhnya Terhadap Minat Melanjutkan Studi Ke IAIN Alauddin Makassar.	Syariah	Mandiri	

22	Drs.H. Nihaya M Nip. 150 196 130/TV/c	Sejarah Pembaharuan Pemikiran Islam Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Nurcholis Majid)	Ushul.	Mandiri
23	Prof.Dr. H. Abd. Rahman Getteng dkk Nip. 150 020 216 / IV/d	Minat Tamatan Madrasah Aliyah Dan Pesantren Memasuki IAIN Alauddin Makassar	Tarbiyah	Kolektif
24	Staf Pusat penelitian, dkk	Intensitas Perkuliahan dan Kualitas Penyajiannya di IAIN Alauddin Makassar	Puslit	Kolektif Dr.Moh. Natsir Mahmud, M.A.
25	Drs. Darussalam S, M Ag. Nip. 150 243 651/ III/d dkk	Peran Alumni IAIN Dalam Memotivasi Masyarakat Beragama Di Kota Makassar	Syariah	Kolektif

Makassar, 25 April 2002



REKTOR, *[Signature]*

**PROF. DR. HABD. MUIN SALIM**  
NIP. 150 036 706

**PANITIA PELAKSANA  
PELATIHAN METODOLOGI PENELITIAN  
TENAGA EDUKATIF IAIN ALAUDDIN  
UJUNG PANDANG**

---

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Panitia Pelaksana Pelatihan Metodologi Penelitian Tenaga Edukatif IAIN Alauddin Ujungpandang menerangkan bahwa :

Nama : Drs. Muhammad Saleh Ridwan  
Pangkat/NIP : III/8 / 150 259 442  
Tempat Tugas : Fak. Syariah IAIN Alauddin

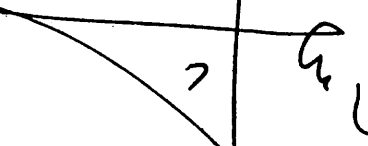
Telah mengikuti Pelatihan Metodologi Penelitian Tenaga Edukatif **TINGKAT DASAR** yang berlangsung dari tanggal 19 s/d 24 Mei 1997 di kampus IAIN Alauddin Ujungpandang.

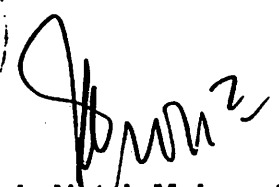
Ujungpandang, 26 Mei 1997

**PANITIA**

Ketua,

Sekretaris,

  
Drs. H. Danawir Ras Burhany  
NIP. 150 057 462

  
Dr. Moh. Natsir Mahmud, MA  
NIP. 150 217 170

